

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Daerah (Renstra Dispenda) tahun 2014-2018 adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran/tujuan pembangunan urusan Pendapatan Daerah selama kurun waktu tahun 2014-2018 dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Daerah, berpedoman kepada RPJMD Pemerintah Kabupaten Merangin tahun 2014-2018, bersifat indikatif, dapat digunakan sebagai instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

Proses penyusunan Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Daerah tahun 2014-2018 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu :

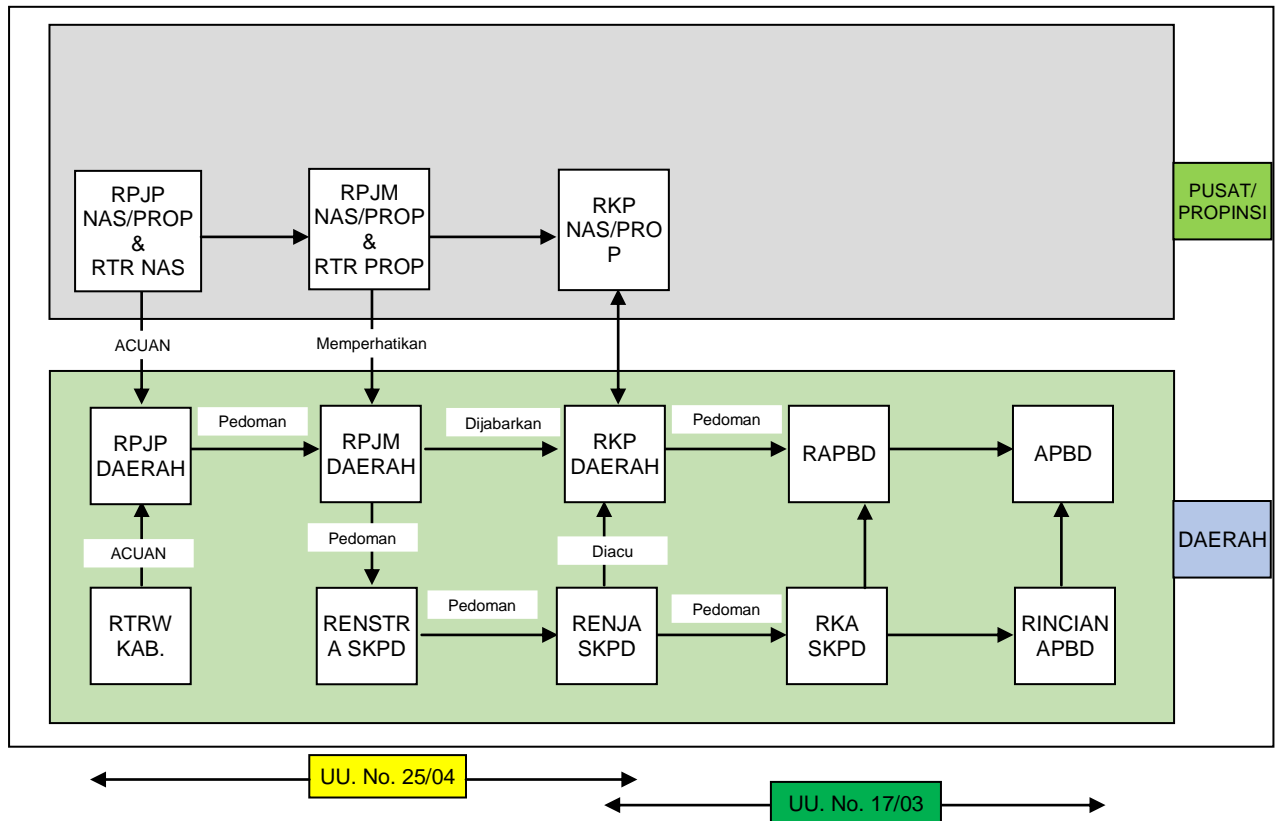
- a. Persiapan penyusunan Renstra Badan pengelola pajak dan retribusi Daerah
- b. Penyusunan rancangan Badan pengelola pajak dan retribusi Daerah
- c. Penyusunan rancangan akhir Badan pengelola pajak dan retribusi Daerah
- d. Penyusunan Renstra Badan pengelola pajak dan retribusi Daerah dilaksanakan oleh tim penyusun yang beranggotakan seluruh pejabat struktural berdasarkan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Daerah Kabupaten Merangin.

Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Daerah tahun 2014-2018 menyelaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Merangin yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dengan demikian diharapkan terwujud hasil akhir dari proses penyusunan dokumen Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Daerah Kabupaten Merangin dapat menghasilkan dokumen rencana yang sinergis dan terpadu dalam aspek pengelolaan pendapatan daerah sebagai salah satu modal dasar

terselenggaranya pembangunan daerah dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna. Hubungan antara Renstra SKPD dengan dokumen lainnya disajikan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 1.

**Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**



Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Daerah Kabupaten Merangin setiap tahun akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Badan pengelola pajak dan retribusi Daerah Kabupaten Merangin digunakan sebagai dasar/acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan.

Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Daerah Nomor 421 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018. Dengan terbitnya Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru. Selain itu Pemerintah Kabupaten Merangin juga melakukan perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018. Sejalan dengan perubahan Struktur Organisasi dan RPJMD, maka dilakukan pula review dan revisi terhadap Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018. Perubahan Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 sesuai dengan hasil review yang dilakukan mencakup :

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran OPD
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang mengacu pada Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin 2014-2018 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

## **B. Landasan Hukum**

Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD) Badan pengelola pajak dan retribusi Daerah disusun berdasarkan landasan idil Pancasila, dan konstitusi Undang - Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut;

1. Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas daerah Kabupaten Merangin;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 34 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin Tahun 2014–2018;
16. Peraturan Bupati Merangin nomor 46 tahun 2015 Tentang perubahan ketiga peraturan Bupati Merangin nomor 48 tahun 2014 Tentang indikator kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin tahun 2014-2018 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
17. Peraturan Bupati Merangin Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Perubahan Capaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018;

### **C. Maksud Dan Tujuan**

Maksud Rencana Strategis Badan pengelola pajak dan retribusi Daerah adalah;

1. Merupakan perangkat dokumen untuk mencapai harmonisasi perencanaan Pengelolaan Badan pengelola pajak dan retribusi Daerah kurun waktu lima tahun secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi dengan kebijakan pembangunan daerah;
2. Menyediakan pedoman perencanaan dibidang Pengelolaan Badan pengelola pajak dan retribusi Daerah dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan pembangunan daerah;
3. Memberikan arahan rencana tahunan yang dilengkapi dengan indikator dan sasaran kinerja yang jelas dan terukur;

4. Menyediakan tolok ukur evaluasi dan penilaian Bupati Merangin;
5. Memberikan gambaran arah kondisi perekonomian daerah yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Badan Pengelola Pajak dan retribusi Daerah adalah;

1. Menjabarkan visi dan misi dinas yang diselaraskan dengan visi dan misi Kabupaten Merangin dalam bentuk kerangka perencanaan program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas yang terpadu, terarah dan terukur sesuai dengan kebutuhan daerah;
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna;
3. Mengarahkan dan menselaraskan setiap rencana pembangunan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan secara bertahap dan berkesinambungan.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2018 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin, terdiri dari :

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### 1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian tentang Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga, dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD.

#### 2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan anggaran SKPD.

#### 3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD.

#### 4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isidokumen.

### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahdaerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RenstraSKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

#### 1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD.

#### 2. Sumber Daya SKPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

#### 3. Sarana dan Prasarana Kerja SKPD

Bagian ini menunjukkan tentang sarana dan Prasarana yang terdapat di SKPD yang dapat menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja secara optimal

### **BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor yang mempengaruhinya.

#### 2. Telaahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD.

3. Telaahan rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

4. Penentuan Isu-isu strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD

#### **BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

1. Visi dan Misi SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD

2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang disajikan dalam tabel.

3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.

#### **BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang disajikan dalam tabel.



## **BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang disajikan dalam tabel.

## **BAB VII. PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

#### **A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah**

##### **1. Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin.**

- a. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang pendapatan daerah.
- b. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan beratnggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

##### **2. Tugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin.**

Berdasarkan Peraturan daerah kabupaten merangin nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

##### **3. Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin**

- a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyusunan rencana dan program pendapatan daerah;
- c. Melaksanakan pembinaan tentang pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah;
- d. Melaksanakan pembinaan teknis dan operasional sesuai kebijakan yang telah ditetapkan ;
- e. Mengendalikan bimbingan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan administrasi, keuangan dan kegiatan teknis dibidang pendapatan daerah;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### **4. Struktur organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin**

Berdasarkan Peraturan daerah kabupaten merangin nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Merangin terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Badan
- b. Unsur Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dibantu oleh:
  - 1) Subbag Umum dan Kepegawaian
  - 2) Subbag Program dan Keuangan
- c. Unsur Pelaksana yaitu :
  - 1) Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan yang terdiri dari :
    - a) Subbid Pendataan dan Pendaftaran
    - b) Subbid Penetapan
    - c) Subbid Pengelohan Data
  - 2) Bidang Pengembangan Regulasi dan Pelaporan yang terdiri dari :
    - a) Subbid Pengembangan
    - b) Subbid Regulasi
    - c) Subbid Pelaporan
  - 3) Bidang Penagihan dan Penghapusan yang terdiri dari :
    - a) Subbid Penagihan
    - b) Subbid Keberatan dan Banding
    - c) Subbid Penelitian dan Penilaian
- d. Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Merangin.
- e. Berdasarkan peraturan Bupati Merangin Nomor 39 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Inspektorat dan Badan Daerah.

## STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2016

**KEPALA BADAN**  
JAILANI, S.Sos  
PEMBINA TK.I (IV.b)  
NIP.19641107 198608 1 001

**SEKRETARIAS**  
FERDI FIRDAUS, S.Sos., ME  
PEMBINA TK.I (IV.b)  
NIP. 19710626 199201 1 002

**SUBBAG  
UMUM & KEPEGAWAIAN**  
KONITA AGUSTINA, SE  
PENATA (III.c)  
NIP.19800807 200903 2 002

**SUBBAG  
PROGRAM & KEUANGAN**  
INDRA IRWINSYAH, SE  
PENATA MUDA TK.I (III.b)  
NIP.19850704 201101 1 004

**BIDANG PENDAFTARAN,  
PENDATAAN DAN  
PENETAPAN**  
SUKMAYADI, SE  
PEMBINA (IV/a)  
NIP.19600525 198405 1 001

**BIDANG PENGEMBANGAN  
REGULASI DAN PELAPORAN**  
SYAFRIL. T., SE  
PENATA (III.c)  
NIP.19650806 199103 1 006

**BIDANG  
PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN**  
BUSTAMI, S.IP, MM  
PENATA TK.I (III.d)  
NIP.19671007 199003 1 006

**SUB BIDANG PENDATAAN DAN  
PENDAFTARAN**  
SYARLI ASTIKA WIDIA, SE  
PENATA MUDA TK.I (III/b)  
NIP.19850906 200312 2 003

**SUB BIDANG PENGEMBANGAN**  
HENRI OKTAVIANUS, S.Kom  
PENATA TK. I (III.d)  
NIP.19791016 200312 1 003

**SUB BIDANG PENAGIHAN**

**SUB BIDANG PENETAPAN**  
NOVIANA K. BACHFIANI, SE., M.Si  
PENATA TK.I (III/d)  
NIP.19751122 200003 2 002

**SUB BIDANG REGULASI**  
HAMDAN TOHA  
PENATA (III.c)  
NIP.19601231 198903 1 069

**SUB BIDANG KEBERATAN DAN  
BANDING**  
NUR ASYIAH, SE  
PENATA (III/c)  
NIP.19780415 200312 2 004

**SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA**  
FAIRUS TIANTI, S.Pd  
PENATA (III.c)  
NIP.19671226 199602 2 001

**SUB BIDANG PELAPORAN**  
FENNY YULIASARI, SE  
PENATA TK.I (III.d)  
NIP.19750707 200501 2 005

**SUB BIDANG PENELITIAN DAN  
PENILAIAN**  
SUPIANTO, S.Ps.I  
PENATA (III.c)  
NIP.19800717 200903 1 003

## B. Sumber Daya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Sebagai upaya dalam menunjang pembangunan Pendapatan Daerah pada masa akan datang maka diperlukan sumber daya manusia yang mencukupi secara kualitas maupun kuantitas. Kondisi sumber daya manusia yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah saat ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel. 2.1

### JUMLAH PEGAWAI BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2016 (MENURUT JABATAN DAN ESELONERING)

NO	UNIT KERJA	PNS (Eselon/Orang)					JML	HONDA
		II	IIIA	IIIB	IV	STAF		
1	Kepala Badan		-	-	1	-	1	-
2	Sekretariat		1	2	1	16	20	16
3	BIDANG PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN	-	-	1	2	8	11	24
4	BIDANG PENGEMBANGAN REGULASI DAN PELAPORAN	-	-	1	2	12	15	13
5	BIDANG PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN	-	-	1	2	25	28	24
	<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>61</b>	<b>75</b>	<b>77</b>

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bpprd Kab. Merangin Tahun 2016

Menurut data yang ada PNS BPPRD Kabupaten Merangin berdasarkan Pendidikan sebagai berikut Pasca Sarjana (S.2 sederajat) berjumlah 2 orang, Strata 1 (S.1 sederajat) berjumlah 27 orang, Diploma III (D.3 sederajat) berjumlah 9 orang, SLTA (sederajat) berjumlah 18 orang dan SLTP (sederajat) 1 orang. Untuk lebih jelasnya bias dilihat pada tabel.2.2

Tabel. 2.2

**JUMLAH PEGAWAI BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH TAHUN 2016  
(MENURUT PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN)**

No	Pendidikan	Pangkat / Golongan (Orang)										JLH	
		II				III				IV			
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b		
1	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SLTP	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3	SLTA				-	18		-	-	1	-		19
4	SARJANA MUDA (D3)	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	9
5	STRATA 1 (S1)	-	-	-	-	6	4	3	2	5	2		17
6	STRATA 2 (S2)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-		2
7	STRATA 3 (S3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
<b>J u m l a h</b>		<b>1</b>				<b>43</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>2</b>		<b>48</b>

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian BPPRD Kab. Merangin Tahun 2016

Untuk memenuhi persyaratan menduduki jabatan struktural yang ada di Badan pengelola pajak dan retribusi daerah Kabupaten Merangin, maka kepada mereka yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan maupun penjenjangan dapat diangkat pada jabatan struktural. Persyaratan penjenjangan diperoleh aparatur melalui Pendidikan dan Latihan Pimpinan (Diklatpim). Jumlah pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BPPRD) yang telah mengikuti Diklat Pim sampai Tahun 2016 menurut jabatan dan tingkat penjenjangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.

**JUMLAH PEGAWAI BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH TAHUN 2016  
MENURUT JABATAN DAN TINGKAT PENJENJANGAN**

No	Jabatan	Telah Mengikuti Diklat Penjenjangan			Keterangan
		PIM II	PIM III	PIM IV	
1	Kepala Badan	-	1	-	1 orang
2	Sekretaris	-	1	-	1 orang
2	Kabid	-	2	1	3 orang
3	Kasubag/ Kasi	-	-	4	4 orang
4	Staf	-	-	1	1 orang
<b>J u m l a h</b>			<b>4</b>	<b>6</b>	<b>11 orang</b>

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bpprd Kab. Merangin Tahun 2016

Upaya pengembangan sumberdaya manusia di Badan pengelola pajak dan retribusi daerah Kab. Merangin terus dilakukan setiap tahunnya melalui pendidikan dan latihan. Selain diklat struktural, Bappeda juga mengirimkan aparaturnya untuk mengikuti diklat-diklat fungsional. Untuk lebih jelasnya tabel berikut memperlihatkan data aparatur BPPRD yang telah mengikuti Diklat Struktural.

Tabel 2.4.

**DIKLAT STRUKTURAL YANG TELAH DIIKUTI PEGAWAI BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN MERANGIN**

No	Nama	Jenis Diklat Struktural	Tgl Pelatihan/Tahun	Tempat	Pelaksana
1.	Jailani,s.Sos	Diklat Pim III	2006	Jambi	Bangdiklat Prov.Jambi
2.	Agus Daersya,SE	Diklat Pim III	2012	Jambi	Bangdiklat Prov.Jambi
3.	Sukmayadi,SE	Diklat Pim IV	06-08-2007	Jambi	-
4.	Abdul fattah,SE	Diklat Pim IV	1998	Jambi	-
5.	Bustami,S.IP,MM	Diklat Pim IV	2008	Jambi	Pemkap Merangin
6.	Hamdan toha	Diklat Pim IV	2008	Bangko	Pemkap Merangin
7.	Nur asyiah,SE	Diklat Pim IV	2008	Bangko	Pemkap Merangin
8.	Noviana krista Bachfiani,SE,M.Si	Diklat Pim IV	2002	Bangko	Pemkap Merangin
9.	Fairus tianti,S.Pd	Diklat Pim IV	2013	Bangko	Pemkap Merangin
10.	Syafril.T,SE	Diklat Pim IV	2013	Bangko	Pemkap Merangin
11.	M.Abdi Suryana.SE.MM	Diklat Pim III	2010	Bangko	Pemkap Merangin



Keberhasilan operasionalisasi organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tidak akan terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana (aset) yang memadai. Sarana dan prasarana menjadi kebutuhan yang sangat penting guna mewujudkan kinerja yang optimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Bappeda Kabupaten Merangin. Sarana dan prasarana dimaksud diantaranya lahan, gedung tempat kerja, sarana kerja, sarana mobilitas dan sarana pendukung lainnya. Gambaran sarana dan prasarana atau aset yang ada di Bpprd Kabupaten Merangin sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut;

### C. Sarana dan Prasarana Kerja

Sarana dan prasarana kerja yang terdapat pada BPPRD Daerah Kabupaten Merangin yang menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja secara optimal. Sarana dan prasarana kerja terdiri dari perlengkapan dan peralatan serta sarana mobilitas adalah sebagai berikut :

*Tabel 2.5*

#### **Data Aset Badan Pengelola Pajak dan Retribuson Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014**

No	PerlengkapandanPeralatan Kantor	Jumlah (Unit)
1	Kursi	100
2	Kursi Biro	10
3	Kursi Rapat	25
4	Kursi Busa	5
5	Kursi dengan tangan	50
6	Kursi Kayu	-
7	Kursi Lipat	20
8	Kursi Putar	20
9	Kursi Rotan	-
10	Kursi Busa	15
11	Kursi Spon	-
12	Kursi SponTangan	5
13	Kursi Tunggu Aluminium Panjang	2
14	Meja Biro	10
15	Meja ½ biro	65
16	Meja bundar	-
17	Meja Counter	1
18	Meja Formulir	1
19	Meja kayu	50

20	Meja computer	10
21	Meja kursi tamu	4
22	Meja tamu	1
23	Meja rapat	25
24	Meja telepon	1
25	Mesin ketik	-
26	Monitor	-
27	Server	3
28	Komputer	55
29	Laptop	15
30	Note Book	2
31	LCD Proyektor	1
32	Lemari Es	1
33	Lemari Kecil	5
34	Mega phone	-
35	AC	11
36	Almari Besi	-
37	Almari Kaca	5
38	Almari Kayu	6
39	Almari Sorok	2
40	Brankas	-
41	Camera	3
42	Handycam	1
43	Cash Box	-
44	Dispencer	4
45	Faximile	1
46	Filing Cabinet	6
47	Genset	-
48	Gerenda	-
49	Hub	4
50	Jam Dinding	4
51	KipasAngin	1
52	Papan Rekap PBB	1
53	Power suplay	3
54	Printer	10
55	Proyektor Light/OHP	-
56	Radio Tape	-
57	Rak Besi	-
58	Rak Kayu	2
59	Rak Kayu Kaca	3
60	Rak Telepon	1
61	Skat Ruangan	2
62	Sound System	1
63	Stabilizer	5
64	Swicth	-
65	Tanngga	-

66	Telepon	2
67	Televisi	2
68	Wadrobe	-
69	White Board	1
70	Wireless	-
71	LCD	1
72	Kendaraan Dinas R4	4
73	Kendaraan Dinas R2	12

**Tabel 2.7**  
**Perkembangan Anggaran Badan Pengelola Pajak dan retribusi Daerah Kabupaten Merangin Setelah Perubahan Tahun 2014-2016**

NO	TAHUN	ALOKASI ANGGARAN		JUMLAH (Rp)
		BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG (Rp)	
1	2	3	4	5
1.	2014	3.223.915.180,68	2.821.124.400,00	6.045.039.580,68
2.	2015	3.917.160.622,28	6.319.783.980	10.236.944.602,80
3.	2016	4.896.772.116,73	2.963.332.570,00	7.860.104.686,00

Sedangkan persentase realisasi anggaran dan peningkatan anggaran per tahun dapat dilihat pada tabel berikut;

**Tabel 2.8**  
**Realisasidan Peningkatan Anggaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2016**

NO	TAHUN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI ANGGARAN (%)	PENINGKATAN ANGGARAN (%)
1	2	3	4	5	6
1.	2014	6.045.039.580,68	7.387.899.707,91	1,22%	(kosong)
2.	2015	10.236.944.602,80	9.063.360.799,92	0,88%	0,69%
3.	2016	7.860.104.686,00	8.339.195.415,00	1,06%	-0,23%

## 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin

Sesuai dengan tupoksinya, pelayanan Bappeda Kabupaten Merangin didominasi oleh penyusunan dokumen perencanaan, baik dokumen perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang. Dalam lima tahun, dari tahun 2008-2013, didapatkan capaian kinerja pelayanan yang ditampilkan dalam tabel dihalaman berikut ini.

**Tabel 2.9**  
**Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi Badan pengelola pajak dan retribusi daerah Tahun 2014-2016**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Persentase Capaian Realisasi
1	2	3	4	5
1	Penyediaan Barang Barang Cetak dan Pengandaan	1 jenis	1 jenis	100%
2	Penagihan Pajak PBB dan BPHTB	800 Kali	800 Kali	96%
3	Monitoring dan Evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB	20	20	100%
4	Pengelolaan data wajib pajak dan Wajib retribusi Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
5	Pembuatan kartu dan identitas wajib pajak dan retribusi	3000 kartu	3000 kartu	100%
6	Penerbitan dan penyampaian surat ketetapan pajak dan retribusi daerah	12 wajib pajak	12 wajib pajak	100%
7	Penyampaian DHKP dan SPPT PBB	24 wajib pajak	24 wajib pajak	100%
8	Penerbitan SPPT dan DHKP PBB	12 wajib pajak	12 wajib pajak	100%
9	Uji Petik Objek dan Subjek Pajak Daerah	WP/WR	WP/WR	100%
10	Pendataan dan penyampaian SPT Pajak dan Retribusi Daerah	WP/WR	WP/WR	80%
11	Pemuktahiran data objek pajak dan subjek pajak PBB	12 DATA BASE	12 DATA BASE	100%
12	Penertiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi	4 KALI	4 KALI	100%
13	Penyampaian SPT pajak dan Retribusi Daerah	2800 WP/WR	2800 WP/WR	100%
14	Pemuktahiran data ZNT NIR	12 DATA BASE	12 DATA BASE	100%

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Merangin**

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan pengelola pajak dan retribusi daerah, selaku Badan Perencanaan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah, mempunyai peluang sekaligus kendala dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja. Adapun peluang yang ingin dicapai, antara lain:

1. Adanya tuntutan peningkatan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan program pembangunan di daerah. Ini merupakan peluang untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan koordinasi pembangunan yang merupakan kewenangan Bappeda selaku Badan Perencanaan Pembangunan;
2. Sebagai Badan Perencanaan Pembangunan, Bpprd mempunyai kewenangan horisontal/koordinasi dalam merumuskan dan menjabarkan program pembangunan di Kabupaten Merangin;
3. Dengan makin dinamis dan kompleknya pembangunan, maka Bpprd mempunyai peluang dalam memperkuat eksistensinya selaku koordinator perencanaan pembangunan;
4. Sebagai badan perencana yang memiliki beban kerja cukup besar dan mengingat segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan harus diawali dengan perencanaan, maka dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas/operasional Bappeda memiliki peluang untuk penyusunan peraturan-peraturan daerah yang mendukung tugas koordinasi Bpprd Kabupaten Merangin. Tugas koordinasi Bappeda yang dimaksud ialah Koordinasi pelaporan dan evaluasi penggunaan dana DAK, Dana Dekon dan Dana Tugas Pembantuan.
5. Dengan makin beratnya tantangan dalam pelaksanaan tugas Badan pengelola pajak dan retribusi daerah sekarang dan masa yang akan datang. Maka, Badan pengelola pajak dan retribusi daerah memiliki peluang untuk meningkatkan kompetensi teknis PNS dalam bidang Analisis Perencanaan Pembangunan serta Tata

Pemerintahan Yang Baik, Pengembangan Ekonomi Lokal, Perubahan Iklim (*Climate Change*), Pariwisata dan Ketahanan Pangan.

Adapun kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas kinerja Bappeda, antara lain :

1. Kurangnya ketelitian dalam perencanaan kegiatan dan pengawasan yang ketat sehingga rencana kegiatan tidak optimal.
2. Disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan belum terealisasi dengan sempurna.
3. Efisiensi, efektifitas dan keekonomisan pelaksanaan kegiatan belum terlaksana dengan baik.
4. Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Aparatur tidak optimal
5. Kurang optimalnya penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia untuk merencanakan pembangunan Kabupaten Merangin kedepan yang lebih terarah.

Untuk melihat sejauh mana tingkat persiapan dan perkembangan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, telah dilakukan evaluasi baik dalam bentuk rapat staf secara berkala maupun pertanggungjawaban laporan per semester. Melalui upaya ini, secara umum tidaklah ditemukan hambatan dan permasalahan yang sangat prinsipil dalam rangka penyelesaian kegiatan dimaksud.

**BAB III**  
**ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

**A. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayan Dinas Pendapatan Daerah**

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Daerah (BPPRD) Kabupaten Merangin dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor : 39 Tahun 2016 tanggal 21 November 2016, Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin, tentang Rincian Tugas dan Fungsi. Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Daerah (BPPRD) Kabupaten Merangin, sebelumnya merupakan gabungan dari Bagian Keuangan Setda Kab. Merangin dengan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Daerah Kab. Merangin sejak Tahun 2009 menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merangin.

Semenjak berpisah dengan DPKAD tanggal, 10 Maret 2014 maka BPPRD Kab. Merangin menempati Gedung Eks PDE yang terletak di Komplek Sekretariat Daerah Kab. Merangin, Kemudian sejak tanggal, 15 Januari 2015 menempati Gedung eks Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kab. Merangin yang beralamatkan di Jalan Jend. Sudirman - Lintas Sumatera Km.1 Bangko.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Dearah Daerah Kabupaten Merangin sebagai suatu lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati, Tugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Daerah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Desentralisasi dibidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

*Tabel 3.1 : Matrik Identifikasi Permasalahan Pelaksanaan Pelayanan SKPD Berdasarkan Tugas dan Fungsi Nadan Pengelola Pajak Dan Reribusi Daerah*

No	ASPEK KAJIAN	KONDISI SAAT INI	PERMASALAHAN
<b>KONDISI INTERNAL</b>			
1.	Sumber Daya Manusia	1. Jumlah personil Aparatur Kabupatenterdiri dari 56 orang PNS dan 59	1. Kurangnya personil Aparatur Kabupaten khususnya personil staf pelaksana PNS

No	ASPEK KAJIAN	KONDISI SAAT INI	PERMASALAHAN
		<p>orang Non PNS</p> <p>2. personil PNS Dinas Pendapatan Daerah yang memiliki kapabilitas dengan kategori baik 56 (lima puluh enam) orang atau 100%, kategori cukup sebanyak 0 (nol) orang atau sebesar 0%, dan yang memiliki kategori kurang sebanyak 0 (nol) orang atau sebesar 0%.</p> <p>3. dari 56 (lima puluh enam) orang personil staf PNS tersebut, semua memiliki semangat dan kemauan belajar yang cukup tinggi</p>	<p>2. Minimnya kesempatan personil Aparatur Dispenda untuk mengikuti bimtek, diklat/pelatihan.</p> <p>3. Masih rendahnya pemahaman pejabat struktural Dinas Pendapatan Daerah terhadap system pengendalian intern SKPD</p>
2.	Asset/Modal	<p>1. nilai total investasi yang berwujud asset atau modal sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp.18.690.671.780,-</p>	<p>1. Masih Minimnya sarana dan prasarana pendukung kerja Aparatur Dispenda yang tersedia</p>
3.	Pengelolaan Keuangan SKPD	<p>1. Angka rata-rata pertumbuhan Anggaran sebesar 12,19%</p> <p>2. Rasio realisasi anggaran setiap tahunnya mengalami fluktuasi</p>	<p>1. Dalam penatausahaan keuangan sudah menggunakan system informasi keuangan, namun belum ada tenaga ahli penyelesaian laporan akuntansi keuangan yang mengakibatkan keterlambatan pencairan dana.</p> <p>2. Masih minimnya pemahaman pengelola keuangan SKPD terhadap peraturan tentang standar akuntansi pengelolaan keuangan.</p> <p>3. Masih minimnya pemahaman pelaksana teknis kegiatan dalam</p>



No	ASPEK KAJIAN	KONDISI SAAT INI	PERMASALAHAN
			<p>melaksanakan program dan kegiatan sehingga dapat memperlambat penyelesaian SPJ.</p> <p>4. Pengarsipan dokumen-dokumen keuangan yang tidak tertib dikarenakan minimnya sarana pengelolaan arsip keuangan yang tersedia.</p>
<b>KONDISI EKSTERNAL</b>			
	pemberdayaan aparatur;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semakin ketatnya pengawasan pembangunan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan, sehingga dapat mendorong proses perencanaan pembangunan yang lebih baik.</li> <li>2. diterapkannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang akan berdampak kepada meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.</li> <li>3. Adanya kebijakan nasional yang mengutamakan program dan kegiatan kearah pemberdayaan masyarakat.</li> <li>4. Adanya dana upah pungut dari anggaran belanja daerah yang dapat dibayarkan untuk program pemberdayaan aparatur dispenda.</li> <li>5. Telah dikeluarkannya 3 konsesi/izin lokasi di</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudah berjalannya mekanisme proses perencanaan program kegiatan dari tingkat staf sampai pejabat sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan, namun belum didukung dengan sarana prasarana yang cukup yang mengakibatkan partisipasi aparatur menurun untuk melaksanakan dan mengikuti proses perencanaan ;</li> <li>2. Belum adanya regulasi daerah yang mengatur secara detail tentang proses perencanaan program kegiatan khususnya pajak dan retribusi daerah yang mengakomodasi inovatif daerah.</li> <li>3. Terbatasnya akses informasi program dan kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh unit kerja lain atau swasta</li> <li>4. Belum adanya regulasi daerah yang mengatur tentang SOP pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja</li> </ol>

No	ASPEK KAJIAN	KONDISI SAAT INI	PERMASALAHAN
		sektor perkebunan dan sektor pertambangan di wilayah Kerja Kabupaten Merangin 6. Adanya peluang Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan fasilitasi terhadap peningkatan pemberdayaan pajak dan retribusi daerah melalui pemberian stimulasi pembangunan daerah per wilayah.	pemerintah dan swasta yang melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan aparatur. 5. Belum berkembangnya sector industry di wilayah kerja Kabupaten Merangin, sehingga program dan kegiatan pemberdayaan pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan pihak swasta masih sangat rendah. 6. Belum efektifnya pemberdayaan aparatur Dispenda dalam mendukung program kegiatan peningkatan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi daerah yang ada dikarenakan belum adanya dukungan kuantitas dan kualitas SDM.

### **B. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. Visi pembangunan peternakan dan perikanan merupakan koridor utama yang mengawali kesinergisan dan perjalanan sektor peternakan dan sektor perikanan menuju kondisi yang dicita-citakan. Sebagai bagian dari erekonomian Kabupaten Merangin, visi sektor peternakan dan perikanan selayaknya dapat menjadi penggenap visi pembangunan Kabupaten Merangin. Misi adalah ungkapan eksistensi sebuah organisasi yang dijabarkan dalam bentuk rangkaian kalimat dalam rangka mencapai visi.

Berdasarkan analisa terhadap pernyataan politik Bupati dan Wakil Bupati semasa kampanye Pemilukada, kemudian kondisi umum dan masalah pembangunan

serta isu-isu strategis Kabupaten Merangin saat ini, maka visi RPJMD 2014-2018 Kabupaten Merangin adalah:

Visi Daerah Kabupaten Merangin adalah “ **BERBENAH** menuju **MERANGIN EMAS**”.

**BANGUN EKONOMI RAKYAT:** Mengartikan bahwa hal yang utama dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah adalah menciptakan stabilitas ekonomi yang memungkinkan masyarakat menjalankan kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi secara efisien dan efektif.

**BERSIH:** Mengartikan bahwa suatu kondisi dimana aparatur pemerintah daerah memberikan pelayanan yang prima dan akuntabel

**AMANAHAH:** Mengartikan bahwa aparatur negara menjalankann tugasnya dengan penuh tanggung jawab, jujur dan disiplin.

Misi Daerah Kabupaten Merangin dalam mencapai Visi Daerah adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Birokrasi Kepada Dengan Mengedepankan Transparansi, Efisiensi, Efektif Dan Akuntabilitas.
2. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Dasar.
3. Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Pendidikan Dan Kesehatan.
4. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian dan UMKM.
5. Meningkatkan Prestasi Generasi Muda Dan Kesetaraan Gender.
6. Meningkatkan pengelolaan dan Perlindungan Hutan, Sumber Daya Alam (SDA) dan Mineral yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu selaras dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel partisipatif dan berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah melalui rekrutmen yang baik dan peningkatan kesejahteraan
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar yang merata dan berkualitas
4. Mengembangkan kawasan sentra produksi, kawasan ekonomi strategis dan perumahan yang berkualitas
5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas dan tenaga kerja yang berkompetensi
6. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas
7. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan daya saing investasi, ketengakerjaan dan kinerja BUMD
8. Meningkatkan pendayagunaan, potensi agrowisata dan pengelolaan sumberdaya pertanian untuk kesejahteraan petani dan peningkatan pendapatan daerah
9. Meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi serta mengurangi kesenjangan pembangunan melalui ekonomi kerakyatan
10. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur olahraga dan pembinaan atlet berprestasi
11. Meningkatkan prestasi pemuda dan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah
12. Meningkatkan penataan zona dan melestarikan kawasan hutan lindung, cagar budaya tradisional melayu sebagai pusat penelitian dan, wisata alam dan budaya.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, ditetapkan kriteria dan indikator-indikator komposit sebagai indikasi perwujudan pencapaian Visi RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018. Penjabaran kriteria dan indikator-indikator keberhasilan untuk mewujudkan visi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

**Misi Pertama: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Birokrasi dengan Mengedepankan Tansparansi, Efisiensi, Efektifitas dan Akuntabilitas.**

VISI : 'BERBENAH' ( BANGUN EKONOMI RAKYAT, BERSIH DAN AMANAH) MENUJU MERANGIN EMAS				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	
1.Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berkualitas	1. Penataan organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan	Restrukturisasi organisasi yang berorientasi pada pencapaian visi - misi daerah	Melakukan evaluasi struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan dan berpedoman pada peraturan yang berlaku.	
	2. Penataan dan implementasi sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis e-planning, e-budget dan e-audit.	Implementasi sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis e-planning , e-budget dan e-audit	Penyempurnaan secara terus menerus implementasi e-planning, e-budget dan e-audit Peningkatan kompetensi pengelola keuangan dan anggaran berbasis e-planning, e-budget dan e-audit.	
	3. Penataan administrasi dan birokrasi Kabupatendan desa/kelurahan	Penataan administrasi dan birokrasi Kabupatendan desa/kelurahan berdasarkan potensi dan kemampuan	Penataan administrasi dan birokrasi Kabupatendan desa/kelurahan berdasarkan wilayah sangat tertinggal, tertinggal dan maju.	Menetapkan Kabupatenberbasis pelayanan terpadu melalui peraturan kepala daerah
		Peningkatan pelayanan publik terpadu Kabupaten	Perda pelayanan public mampu meningkatkan kepastian hukum dan pendapatan asli daerah	KPPT berfungsi sebagai lembaga terpadu pelayanan public Peningkatan pendapatan asli daerah melalui pelayanan terpadu Sistem komputerisasi pembangunan pelayanan public.
	4. Peningkatan Sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN dan berkinerja baik	Pembentukan Perda tentang pelayanan publik	Pelayanan publik bebas dari KKN dan berkualitas.	Perda pelayanan publik mampu meningkatkan kepastian hukum dan pendapatan asli daerah
		Penguatan lembaga pelayanan terpadu satu pintu/Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT)		
		Peningkatan sistem komputerisasi pelayanan publik		
		Peningkatan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik		
	2.Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah melalui rekrutmen yang baik dan peningkatan kesejahteraan	1. Peningkatan sistem perekrutan CPNS dan pegawai kontrak/ honorer yang bebas KKN dan memberikan perhatian khusus untuk putra-putri Merangin.	Penerimaan CPNS dan pegawai kontrak/ honorer berdasarkan kompetensi dan kebutuhan daerah	Penerimaan CPNS dan pegawai kontrak/ honorer dengan memprioritaskan calon yang berasal dan berdomisili di Kabupaten Merangin
			Melakukan evaluasi kebutuhan berdasarkan beban kerja untuk mengetahui formasi CPNS setiap tahun	Formasi CPNS dan pegawai kontrak/ honorersesuai dengan beban kerja setiap SKPD
Pelaksanaan rekrutmen CPNS dan pegawai kontrak/ honorer yang didasarkan pada kebutuhan beban kerja dan bebas KKN			Sistem recruitment CPNS dan pegawai kontrak/ honoreryang bebas KKN	
2. Peningkatan kesejahteraan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan		Pemberian insentif pegawai kontrak/ Honorer Daerah dan pejabat pemerintahan	Insentif Daerah diberikan sesuai dengan beban kerja dan prestasi kerja serta lokasi tempat tugas.	
		Pemberian insentif untuk guru PNS dan Non PNS daerah tertinggal	Insentif Guru ditingkatkan sesuai dengan kemampuan daerah	

	3. Peningkatan insentif untuk pegawai SARA (Imam, Balai, Khatib dan Guru Ngaji).	Pemberian insentif untuk pegawai SARA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	Pemberian insentif bagi pegawai SARA di setiap desa/kelurahan
		Pemberian penghargaan kepada pegawai SARA teladan	Pemberian penghargaan bagi pegawai SARA teladan di setiap desa/kelurahan

Tabel 3.3

### Misi Kedua: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Dasar

VISI : 'BERBENAH' ( BANGUN EKONOMI RAKYAT, BERSIH DAN AMANAH) MENUJU MERANGIN EMAS			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
1.Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan memperluas akses dan sentra perekonomian masyarakat dan daerah	1. Perbaikan dan pembangunan jalan mulai dari jalan desa, desa ke Kabupaten, dari Kabupaten ke kabupaten dan ke Propinsi	Pengembangan infrastruktur berorientasi pada pengembangan ekonomi wilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum	Meningkatkan aksesibilitas antara pusat-pusat permukiman dengan pusat perekonomian dan produksi serta meningkatkan akses ke desa/wilayah potensial
			Pengembangan sistem prasarana transportasi terpadu untuk mendukung peningkatan pertumbuhan Kabupaten dan desa-desa
			Meningkatkan akses ke desa/wilayah potensial dan sentra produksi yang masih terisolir dan meningkatkan akses ke pasar
	2. Perluasan jangkauan jaringan aliran listrik dan air bersih dengan mengoptimalkan anggaran daerah secara merata dan berkeadilan di setiap desa.	Penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur pertanian	Pengembangan infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi, poergudangan dan pengolahan hasil pertanian
			Pengembangan jalan produksi pada sentra produksi pertanian.
			Pengembangan Energi alternatif dari Potensi setempat dan Mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan
3. Peningkatan dan pembangunan jaringan telekomunikasi	Meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan listrik.	Pemenuhan kebutuhan tenaga listrik untuk menjamin ketersediaan pasokan tenaga listrik serta kehandalannya terutama di daerah krisis listrik serta daerah tertinggal dan perdesaan	
		Pengelolaan sumberdaya air dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan air	
		Pendayagunaan sumberdaya air sebagai pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga	
2.Mengembangkan kawasan sentra produksi, kawasan	1. Pembangunan irigasi terutama di kawasan sentra produksi pertanian masyarakat	Menyediakan jaringan telekomunikasi bagi seluruh masyarakat	Pengembangan jaringan telekomunikasi pedesaan dan perkotaan
		Menyediakan jaringan irigasi untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian khusus tanaman pangan.	Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur irigasi yang berkualitas dan berlanjut.

ekonomi strategis dan perumahan yang berkualitas	2. Menunjang pengembangan Kawasan Jangkat sebagai Kawasan Ekonomi Strategis.	Memfasilitasi penyiapan lokasi sebagai kawasan ekonomi strategis	Menyempurnakan dan menyederhanakan pemberian izin usaha melalui sistem satu pintu. Memfasilitasi investor dalam kemudahan berusaha dan pembebasan lahan
		Penyiapan infrastruktur pendukung kawasan ekonomi strategis	Membantu menyiapkan master plan pendukung pengembangan Kawasan Jangkat yang terintegrasi meliputi infrastruktur jalan dan jembatan menuju kawasan.  Mengembangkan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya dalam mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan daerah sehingga dapat berfungsi sebagai pusat-pusat pertumbuhan yang dapat menggerakkan pertumbuhan wilayah-wilayah yang tertinggal
	3. Penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat tidak mampu.	Menciptakan kualitas dan kuantitas kebutuhan umum perumahan dan pemukiman.	Memenuhi dan peningkatan kualitas Perumahan dan Permukiman melalui bedah rumah
			Meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana lingkungan pada kawasan kumuh perkotaan, desa dan pesisir Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat

Tabel 3.4

### Misi Ketiga: Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Pendidikan dan Kesehatan

VISI : 'BERBENAH' ( BANGUN EKONOMI RAKYAT, BERSIH DAN AMANAH) MENUJU MERANGIN EMAS			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
1.Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas dan tenaga kerja yang berkompetensi	1.Peningkatan kualitas pendidikan melalui Pendidikan Gratis Berkualitas, fasilitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik	Peningkatan sistem pelayanan pendidikan dasar dan menengah untuk mencapai kualitas lulusan yang mampu bersaing di tingkat regional	Meningkatkan kualitas pendidikan untuk tingkat SD/Sederajat, SMP/Sederajat dan SMU/ sederajat
			Meningkatkan pengaturan dalam bentuk perda tentang Sistem Pelayanan Pendidikan bagi SD/Sederajat, SMP/Sederajat dan SMU/ sederajat
			Meningkatkan kualitas lulusan dengan cara pemberian beasiswa untuk siswa SD/SMP/SMU/ sederajat yang berprestasi namun tidak mampu secara ekonomi
			Peningkatan praktek kerja bagi siswa SMK ke tempat-tempat yang mendukung peningkatan kualitas lulusan

			Memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat miskin, daerah tertinggal, penyandang cacat untuk mengikuti pendidikan	
		Peningkatan sistem pelayanan pendidikan tinggi untuk mencapai kualitas lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional	Pendirian politeknik pertanian sesuai potensi agribisnis di Merangin	
			Menyiapkan tenaga professional yang berasal dari Merangin untuk pendidikan Diploma III Agroindustri	
			Pemberian beasiswa berkelanjutan untuk keluarga tidak mampu namun berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata 1 (satu)	
	2.Tenaga Kerja yang terampil dan siap bekerja	Menyiapkan SDM yang terampil yang siap bekerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK) industry	Peningkatan fasilitas pelatihan modern dan instruktur yang berkualitas di BLK	
			Memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat penyandang cacat untuk mengikuti pelatihan di BLK	
2. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas	1.Peningkatan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin yang mudah dijangkau serta berkualitas	Meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan	Memenuhi kebutuhan infrastruktur kesehatan terutama untuk perdesaan dan daerah tertinggal	
			Memenuhi kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat	
	2. Peningkatan ketersediaan peralatan medis, obat-obatan, tenaga medis, dokter umum dan dokter spesialis dengan jumlah yang memadai untuk Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas rawat inap	Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pelayan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat.		Memenuhi rasio tenaga kesehatan yang memadai sehingga mampu memberikan layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat dan daerah.
			Meningkatkan distribusi tenaga kesehatan terutama untuk perdesaan dan daerah tertinggal	Pemerataan distribusi tenaga kesehatan dilakukan secara simultan terutama memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di perdesaan dan daerah tertinggal
	3. Peningkatan ketersediaan peralatan, obat-obatan dengan jumlah yang memadai untuk Puskesmas.	Pendayagunaan fasilitas infrastruktur kesehatan, perbekalan kesehatan dan tenaga kesehatan yang berhasilguna	Pendayagunaan kemampuan layanan puskesmas dan puskesmas pembantu pada setiap Kabupatendan desa	
	4. Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak	Pemberiaan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi keluarga menuju keluarga sehat		Pembinaan masyarakat peserta keluarga berencana dan pelayanan alat kontrasepsi
				Pemberian jaminan kesehatan kepada keluarga miskin
				Pendampingan pelayanan kesehatan ibu dan anak
	Pendampingan dan Perlindungan Bagi Perempuan dan Anak	Pemberian perlindungan bagi Perempuan dan Anak dari kekerasan rumah tangga		



Tabel 3.5

**Misi Keempat: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian dan UMKM**

VISI : 'BERBENAH' ( BANGUN EKONOMI RAKYAT, BERSIH DAN AMANAH) MENUJU MERANGIN EMAS			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
1.Meningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan daya saing investasi, ketengakerjaan dan kinerja BUMD	1.Peningkatan iklim investasi yang sehat melalui reformasi kelembagaan birokrasi dan penyediaan infrastruktur berdaya saing	Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan pendapatan daerah serta ekonomi daerah yang lebih baik	Penyederhanaan prosedur, perijinan yang menghambat kelancaran arus barang dan pengembangan kegiatan jasa perdagangan dan pasar modern dan pasar tradisional Mengintegrasikan pengembangan usaha sesuai dengan potensi daerah dan potensi usaha di setiap daerah
	2.Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemandirian fiskal daerah	Tercapainya kondisi makro ekonomi yang stabil dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Menjaga kebijakan fiskal yang mengarah pada kesinambungan fiskal dengan memberi ruang bagi peningkatan kegiatan ekonomi Menjaga stabilitas perekonomian daerah yang dasari oleh capaian indikator makro ekonomi Menciptakan inovasi baru dalam memperkuat struktur perekonomian daerah yang berbasis pada agro industri dan agribisnis
	3.Peningkatan kinerja BUMD yang dapat memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah	Meningkatkan kinerja dan optimalisasi operasional BUMD	Memantapkan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yaitu transparansi, akuntabilitas, keadilan dan responsibilitas dalam pengelolaan BUMD Perluasan jaringan bisnis BUMD melalui kemitraan usaha
	4.Peningkatan perbaikan iklim ketenagakerjaan dengan upaya menurunkan tingkat pengangguran melalui perluasan kesempatan kerja	Meningkatkan upaya penurunan tingkat pengangguran dan perluasan kesempatan kerja	Menciptakan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi daerah Menciptakan pasar kerja yang kondusif dan transparan bagi pencari kerja dan pemberi kerja Meningkatkan kualitas SDM ketenagakerjaan melalui pembekalan teknis dan peningkatan kompetensi kerja
2.Meningkatkan pendayagunaan, potensi agrowisata dan pengelolaan sumberdaya pertanian untuk kesejahteraan petani dan peningkatan pendapatan daerah	1.Pengembangan potensi agrowisata dan kawasan agrowisata melalui kawasan ekonomi khusus	Mengembangkan potensi kepariwisataan ke dalam kawasan ekonomi khusus	Meningkatkan efektivitas kelembagaan promosi pariwisata daerah Optimalisasi pengelolaan jasa pelayanan pariwisata, dan kawasan wisata Pengembangan kawasan wisata daerah ke dalam kawasan ekonomi khusus
	2.Peningkatan produksi pertanian guna terwujudnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan keluarga	Meningkatkan produksi pertanian serta terjaminnya ketersediaan pangan	Pembangunan pertanian diarah pada pemanfaatan lahan berdasarkan potensi agro-ekoteknologi sehingga menjamin produktifitas lahan Pengendalian alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan produktif ke fungsi penggunaan lain Memberikan bantuan fasilitas dan peralatan produksi pertanian, permodalan dan regulasi yang memihak petani

			Penyempurnaan sistem penyediaan dan distribusi pangan melalui kelembagaan ketahanan pangan berbasis masyarakat
			Peningkatan kemampuan petani dan penguatan lembaga pendukungnya, pengamanan ketahanan pangan, peningkatan produktivitas, produksi dan daya saing produk pertanian serta pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan
		Meningkatkan produktivitas usaha pertanian melalui penerapan teknologi tepat guna.	Penguatan kemampuan teknis budidaya pertanian melalui peningkatan kemampuan manajerial dan penguatan daya saing serta posisi tawar petani
		Meningkatkan efisiensi, daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian	Penguatan kelembagaan ekonomi dan sosial petanidilakukan melalui peningkatan kemampuan berorganisasi secara partisipatif.
			Peningkatan nilai tambah produk pertanian meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani
3. Meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi serta mengurangi kesenjangan pembangunan melalui ekonomi kerakyatan	1.Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	Meningkatnya produktivitas usaha kecil, mikro dan menengah serta koperasi melalui kemitraan usaha dan dukungan fasilitas usaha	Mengembangkan UMKM dan koperasi dengan pendekatan klaster pada sektor agribisnis dan agroindustri yang didukung adanya pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha,
			Mengembangkan UMKM dan koperasi untuk makin berperan dalam agroindustri, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM
			Meningkatkan sistem dalam menumbuhkan wirausaha muda baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi
			Memperluas akses masyarakat, terhadap sumberdaya produktif untuk pengembangan usaha
	2.Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah	Menciptakan pusat pertumbuhan daerah yang berdaya saing melalui kawasan ekonomi khusus	Pengembangan wirausaha koperasi yang handal dan profesional
			Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi khusus pada sentra ekonomi potensial
			Pembangunan khusus daerah tertinggal dan daerah cepat tumbuh

Tabel 3.6

### Misi Kelima: Meningkatkan Prestasi Generasi Muda dan Kesetaraan Gender

VISI : 'BERBENAH' ( BANGUN EKONOMI RAKYAT, BERSIH DAN AMANAH) MENUJU MERANGIN EMAS			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur olahraga dan pembinaan atlet berprestasi	1. Peningkatan ketersediaan fasilitas olah raga di setiap Kabupaten.	Meningkatnya ketersediaan fasilitas olah raga di setiap Kabupaten sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.	Pembangunan fasilitas olah raga berkualitas di setiap Kabupaten

	2.Peningkatan penyiapan atlet berprestasi sejak dini, berkala dan berkelanjutan	Pembinaan atlet sejak dini, berkala dan berkelanjutan	Pembinaan generasi muda sejak dini untuk menjadi atlet berprestasi sesuai dengan minat dan bakat
2. Meningkatkan prestasi pemuda dan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah	1.Peningkatan pemuda/I berprestasi tingkat provinsi dan tingkat nasional	Memfasilitasi pendidikan pemuda Merangin untuk dapat berprestasi di tingkat provinsi dan tingkat nasional	Pembinaan pemuda/I Merangin untuk dapat berprestasi di tingkat provinsi dan tingkat nasional
	2.Peningkatan Kesetaraan Gender yang proporsional dalam pembangunan daerah yang berorientasi pada profesionalisme	Memperbaiki angka GDI (Gender-related Development Index) dan angka GEM (Gender Empowerment Measurement)	Memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak
			Meningkatnya kualitas Sumber Daya Perempuan melalui pendidikan dan pelatihan yang berbasis teknologi
			Meningkatnya peran dan partisipasi perempuan dalam proses politik dan jabatan publik secara proporsional dan profesional

Tabel 3.7

### Misi Keenam: Meningkatkan Pengelolaan dan Perlindungan Hutan, SDA dan Mineral yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan

VISI : 'BERBENAH' ( BANGUN EKONOMI RAKYAT, BERSIH DAN AMANAH) MENUJU MERANGIN EMAS			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Meningkatkan penataan zona dan melestarikan kawasan hutan lindung, cagar budaya tradisional melayu sebagai pusat penelitian dan, wisata alam & budaya.	1. Peningkatan kesadaran para stakeholder tentang pentingnya pelestarian alam dan lingkungan hidup khususnya kawasan konservasi dan perlindungan.	Meningkatkan pemberian pemahaman para pihak tentang pentingnya perlindungan dan pelestarian kawasan konservasi, cagar alam dan budaya	Terciptanya penataan sistem informasi kawasan konservasi, cagar alam dan budaya Pemetaan zonasi kawasan konservasi, cagar alam dan budaya Penindakan tegas terhadap para pihak yang melakukan pelanggaran terhadap kawasan konservasi dan cagar alam dan budaya
	2. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah yang berkenaan dengan lingkungan hidup dan pengelolaan SDA	Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kebijakan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan perilaku positif para pihak untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup
	3. Peningkatan pemberian penghargaan kepada inisiator yang menjaga lingkungan hidup dan menerapkan sanksi secara konsisten terhadap perusak lingkungan hidup.	Meningkatkan motivasi masyarakat untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Meningkatnya motivasi para pihak untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem.
	4.Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang memberi manfaat ekonomi untuk pendapatan daerah dan masyarakat sekitar dengan	Pengelolaan Sumberdaya Alam dilakukan dengan memperhatikan nilai guna bagi daerah dan masyarakat sekitarnya	Menindak tegas setiap pelaku yang merusak daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Meningkatnya tindak tegas pemerintah daerah untuk penerapan sanksi kepada pelaku kerusakan lingkungan hidup
			Pengelolaan Sumberdaya Alam harus diarahkan untuk memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan asli daerah dan pendapatan masyarakat sekitarnya

	dampak lingkungan yang minimal	Pengelolaan sumberdaya alam dilakukan dengan melibatkan masyarakat	Pengelolaan sumberdaya alam diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang berada disekitar kawasan tambang
		Pengelolaan sumberdaya alam dilakukan dengan memperhitungkan kerusakan lingkungan dan infrastruktur sebagai bagian dari biaya produksi pengelolaan	Mengatur pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhitungkan dampak terhadap lingkungan hidup
		Pengelolaan lingkungan dilakukan secara bijaksana untuk meminimalkan dampak lingkungan hidup dan bencana alam	Membangun kesadaran pengelola sumberdaya alam akan dampak yang timbul dari kegiatan eksploitasi dan transportasi hasil pengelolaan.
			Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup dalam menangani fenomena alam dan perubahan iklim global
		Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif dalam memantau kualitas lingkungan hidup.	

*Tabel 12: Hubungan Visi, Misi, dan Program Kabupaten Merangin dengan Tupoksi Dinas Pendapatan Daerah*

NO	Misi dan Program KDH dan Wakli KDH terpilih	Permasalahan Pelayan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Program Optimalisasi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya kontribusi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah</li> <li>Terbatasnya jenis pajak dan retribusi yang dipungut dalam rangka peningkatan PAD</li> <li>Belum maksimalnya Pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah</li> <li>Belum maksimalnya upaya yang dilakukan</li> </ol>	

### C. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

RTRW Kabupaten Merangin memiliki kedudukan sebagai pedoman utama penataan ruang wilayah Kabupaten yang merupakan turunan dari RTRW Provinsi Jambi.

RTRW Kabupaten Merangin menjadi pedoman untuk:

- a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;
- c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
- d. acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
- e. pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten; dan
- f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta peneanaan sanksi.

Berdasarkan dari uraian diatas, maka dalam menetapkan visi dan misi SKPD harus bersinergi dengan apa yang sudah ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten Merangin, oleh karena itu perlu dilakukan review terhadap RTRW yang berkaitan dengan pelayanan SKPD Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tergambar pada table di bawah ini:

*Tabel 3.8*

Telaahan RTRW Kabupaten Merangin terhadap Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Kab.Merangin

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas Dan Fungsi SKPD		Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
	Rencana Tata Ruang	Indikasi Program		Penghambat	Pendorong
1	Pengembangan Pusat Pelayanan Kegiatan (PKL) Perkotaan Bangko Kabupaten Merangin berfungsi sebagai pusat pemerintahan Kabupaten, pusat pelayanan fasilitas umum skala Kabupaten/	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perkotaan;</li> <li>b. pengembangan perkantoran skala Kabupaten;</li> <li>c. pembangunan pusat</li> </ol>	1. Belum berjalannya pelayanan izin terpadu Kabupaten (PATEN)	1. Belum jelasnya pelimpahan kewenangan Bupati kepada SKPD tentang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah dilimpahkan nya perizinan SITU Kelas 3</li> <li>2. Adanya peluang peningkatan SDM</li> </ol>

<p>beberapa Kecamatan/desa, pasar lokal, industri kecil dan kerajinan rumah tangga, simpul transportasi antar Provinsi/Kota/Kabupaten;</p>	<p>perdagangan skala Kabupaten, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pembangunan pertokoan/ruko; dan</li> <li>2. pembangunan SPBU.</li> </ol> <p>d. pembangunan jasa skala Kabupaten, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pembangunan koperasi simpan pinjam/pegadaian; dan</li> <li>2. pembangunan penginapan.</li> </ol> <p>e. pengembangan pusat kesehatan skala Kabupaten, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengembangan Rumah Sakit/Poliklinik/puskesmas rawat inap; dan</li> <li>2. pengembangan puskesmas pelayanan Kabupaten.</li> </ol> <p>f. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pembangunan lapangan olahraga;</li> <li>2. pembangunan taman kota; dan</li> <li>3. pengembangan pariwisata</li> </ol> <p>g. pembangunan Perguruan Tinggi/Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;</p> <p>h. pembangunan masjid;</p> <p>i. pengembangan dan pembangunan pelayanan transportasi berupa pembangunan</p>		<p>perizinan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Masih kurangnya kemampuan Aparatur Kabupaten dalam melaksanakan tugas pelayanan perizinan</li> <li>3. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung tugas pelayanan</li> </ol>	<p>Aparatur Kabupaten</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendukung kerja</li> </ol>
--	--	--	---	--

		terminal; j. pembangunan pusat industri kecil dan kerajinan tangan; dan k. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman			
II	Rencana Pola Ruang				
II.A	Kawasan Lindung				
1	Pengembangan Ruang terbuka Hijau	pengembangan RTH pekarangan • pekarangan rumah tinggal; • halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha; dan taman pada bangunan.			
		pengembangan RTH taman dan hutan kota • taman RT; • taman RW; • taman kelurahan; • taman Kabupaten; • taman kota; dan • hutan kota.			
		• pelaksanaan gerakan satu rumah lima pohon			
II.B	Kawasan Budidaya				
1	Kawasan Hutan	penetapan batas kawasan	Sering terjadinya konflik dalam penetapan batas kawasan hutan	Masih kurangnya sosialisasi dalam penetapan batas kawasan hutan	Adanya pelimpahan kewenangan Bupati Kepada SKPD
		pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan h+utan; dan	Masih kurangnya pelibatan masyarakat	Masih kurangnya fasilitasi terhadap kelompok pengelola hutan	Adanya pelimpahan kewenangan Bupati Kepada SKPD
2	Kawasan Pertanian				
2.1	Kawasan Hortikultura	penetapan kawasan sentra hortikultura dan penetapan komoditas unggulan;	Belum optimalnya pemanfaatan lahan	- Belum terbentuknya kelompok tani wanita	- Adanya kemauan masyarakat untuk

			pekarangan dan lahan tidur di Kabupaten Merangin	- Kurangnya fasilitas dalam pengembangan komoditi hortikultura	mengembangkan komoditas selain perkebunan - Adanya BP3K di Kabupaten Merangin
		peningkatan sarana dan prasarana hortikultura	Minimnya sarana dan prasarana hortikultura	Masih rendahnya Masyarakat dalam menggunakan teknologi pertanian	Adanya Program Satu Milyar Satu kecamatan (SAMISAKE) Provinsi
		penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran; dan	Masih rendahnya fasilitas dalam penguatan kelembagaan petani	- Kurangnya koordinasi Kabupaten dengan UPTD Pertanian - Kurangnya pembinaan dan fasilitas Kabupaten kepada kelembagaan Petani	Adanyanya pelimpahan kewenangan Bupati kepada SKPD
2.3	Kawasan Peternakan				
		peningkatan produktifitas peternakan dengan komoditas sapi, kerbau, kambing, domba, ayam ras petelur, dan ayam ras pedaging; dan	Rendahnya Produktivitas komoditas peternakan	Kurangnya fasilitas terhadap kelompok peternak	Adanya Program Provinsi Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE)
2.5	Kawasan Peruntukan Perikanan				
		penguatan kelembagaan nelayan terkait dengan pengadaan sarana produksi dan pemasaran; dan	Kurang berkembangnya sector usaha perikanan	Kurangnya fasilitas terhadap kelompok usaha sector perikanan	Adanya Program Provinsi Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE)
2.7	Kawasan Peruntukan Pemukiman				
2.7.2	Sarana dan Prasarana Pemukiman Perdesaan	penyediaan perumahan yang memadai, aman dan nyaman bagi masyarakat perdesaan;	Masih adanya Rumah yang tidak layak huni yang tersebar di seluruh pelosok daerah	- Masyarakat tidak mampu untuk melakukan rehabilitasi rumah	Adanya Program Provinsi Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE)



#### **D. Penentuan Isu-isu Strategis**

Pembangunan perekonomian di Kabupaten Merangin tentunya sangat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian provinsi dan nasional berdasarkan kondisi tersebut, seperti yang telah digambarkan sebelumnya terdapat beberapa faktor eksternal dan internal maupun faktor penghambat dan pendorong yang akan sangat mempengaruhi status pembangunan perekonomian di Kabupaten Merangin sampai dengan tahun 2018.

Pembangunan perekonomian tidak hanya mengandalkan dan mengeksploitasi berbagai wilayah dan sektor unggulan saja, melainkan harus diperhatikan keberlangsungan (*sustainable*) dari wilayah dan sektor unggulan tersebut. Di sisi lain, hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, sehingga pembangunan harus melibatkan sisi sosial di dalam pencapaian targetnya. Pendekatan sektoral dalam suatu perencanaan selalu dimulai dengan pertanyaan yang menyangkut sektor apa yang perlu dikembangkan untuk mencapai tujuan pembangunan. Berbeda dengan pendekatan regional, pendekatan ini lebih menitikberatkan pada daerah mana yang perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan, baru kemudian sektor apa yang sesuai untuk dikembangkan di masing-masing daerah. Permasalahan yang sering dihadapi pada pembangunan sektoral adalah sektor mana yang akan dijadikan unggulan di suatu wilayah, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah terhadap sektro-sektor tersebut terutama dalam hal penyebaran investasi. Upaya yang dapat ditempuh untuk mengurangi ketimbangan di dalam perencanaan adalah dengan mengetahui berbagai peran sektoral di dalam pembangunan. Peran dari berbagai sektor inilah selanjutnya dibutuhkan untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Oleh karena itu, berdasarkan data dan informasi yang telah diuraikan, dan kajian Renstra Badan Pengelola Pajak dan Rertibusi Daerah Kabupaten Merangin, RTRW, dan KLHS, maka dapat disusun berbagai isu strategis yang dapat dihimpun untuk pengelolaan pendapatan Daerah.

## 1. Sumberdaya Ekonomi

- a. Agroindustri belum berkembang dengan baik dalam rangka peningkatan nilai tambah dari komoditas unggulan pertanian, dan perkebunan.
- b. Jumlah penduduk miskin yang cenderung meningkat. Dikarenakan terjadinya peningkatan angka garis kemiskinan. Peningkatan tersebut disebabkan terjadinya peningkatan biaya hidup yang terindikasi dari pula meningkatnya biaya kebutuhan pokok.
- c. Pengangguran masih merupakan permasalahan ketenagakerjaan yang diwarnai oleh persoalan kemampuan daya serap tenaga kerja dan ketidaksesuaian latar belakang pendidikan pencari kerja, serta kompetensi yang dimiliki dibandingkan apa yang dibutuhkan dunia usaha.
- d. Investasi daerah belum maksimal pengembangannya yang mengindikasikan kurangnya daya tarik investor. Daya dukung infrastruktur, terbatasnya sistem pelayanan perizinan yang belum standar sehingga berdampak pada ekonomi biaya tinggi bagi investor.
- e. Terjadinya alih fungsi lahan yang potensi tanaman pangan ke perkebunan sawit, sehingga terjadi penurunan luas baku lahan pertanian pangan.
- f. Rendahnya produktivitas lahan dan terjadinya kesenjangan produktivitas karena teknologi yang digunakan, ketersediaan dan kualitas air masih belum sesuai kebutuhan.
- g. Rendahnya tingkat kesejahteraan dan cukup tingginya angka kemiskinan petani tanaman pangan.
- h. Transportasi antar kawasan sentra produksi maupun ke daerah pemasaran masih belum lancar akibatnya posisi tawar petani rendah sedangkan biaya produksi cenderung meningkat.
- i. Usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi yang belum maksimal karena adanya permasalahan pada kemampuan sumber daya manusia dalam mengakses permodalan, dan kemampuan perluasan pasar.
- j. Peranan Koperasi dan lembaga keuangan mikro yang masih rendah. Hal disebabkan pendekatan yang kurang tepat dalam pengembangan kelembagaan, dan terbatasnya gagasan baru.

## **2. Keuangan Daerah**

- a. Masih tingginya tingkat ketergantungan fiskal daerah Kabupaten Merangin terhadap pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan kecenderungan tingginya ketergantungan keuangan Kabupaten Merangin terhadap pemerintah pusat.
- b. Masih rendahnya kontribusi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Iniberarti, belum optimalnya kinerja SKPD terkait dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
- c. Terbatasnya jenis pajak dan retribusi yang dipungut dalam rangka peningkatan PAD. Belum maksimal upaya yang telah dilakukan berkenaan dengan kebijakan diversifikasi pajak dan retribusi daerah
- d. Pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah belum maksimal. Pemanfaatan asset daerah harus dilakukan secara optimal dalam rangka peningkatan PAD.

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### A. Visi dan Misi Dinas Badan Pengelola Pajak dan Rertibusi Daearh Daerah Kabupaten Merangin

Potensi peningkatan pendapatan asli daerah, permasalahan, tantangan, peluang dan kemampuan daerah yang dimiliki Kabupaten Merangin yang akan diwujudkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin 2014–2018, yaitu dengan Visi Kabupaten Merangin adalah; ***“Berbenah Menuju Merangin Emas 2018”***

Dengan berdasarkan visi ini, maka akan menjadi pijakan dan acuan untuk menyusun kebijakan guna mewujudkan pembangunan Kabupaten Merangin, selanjutnya akan menjadi dasar operasional dalam pencapaian visi pembangunan yang ditetapkan. Makna yang cukup dalam itu, tertuang kata ***“Berbenah”***, mengandung uraian makna dari kata ***B = Bangun, E = Ekonomi, R = Rakyat, B = Bersih dan NAH = Amanah***, dan kata ***“EMAS”*** mengandung uraian makna dari kata ***E = Ekonomi, M = Maju, A = Aman, Adil dan S = Sejahtera***

Maka **Visi** Badan Pengelola Pajak dan Rertibusi Daerah untuk mewujudkan Merangin EMAS adalah : ***“Terwujudnya Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan Menuju Kesejahteraan Masyarakat”***

Rencana strategis (Renstra) Badan Pengelola Pajak dan Rertibusi Daerah 2014-2018 lebih beorientasi pada peningkatan pendapatan asli daerah. Dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan dan isu yang ditetapkan serta dengan memperhitungkan peluang dan potensi yang dimiliki untuk mencapai visi tersebut, maka misi yang dilakukan adalah :

***“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Birokrasi dengan Mengedepankan Transparansi, Efisiensi, Efektifitas dan Akuntabilitas”***

## **B. Tujuan dan Sasaran**

### **1. Tujuan**

Tujuan dari Misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah daerah berdasarkan misi dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Daerah adalah *“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik”*.

### **2. Sasaran**

Berdasarkan Tujuan dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah terdapat sasaran yang akan di capai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam kurun waktu lima tahun kedepan, sasaran yang akan dicapai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah:

- a. Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan
- b. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah
- c. Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah
- d. Peningkatan Sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN dan berkinerja baik

## **C. Strategi dan Kebijakan**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas, beberapa upaya strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah dan lembaga DPRD
2. Menyelenggarakan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif sesuai dengan tahapan – tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang - undangan
3. Penataan administrasi dan birokrasi Perangkat Daerah berdasarkan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
4. Menyediakan Regulasi daerah untuk menunjang pelayanan publik

## **1. Strategi**

Dalam rangka mewujudkan sasaran yang terkandung dari misi yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas Badan Pengelola Pajak dan Rertibusi Daerah Kab. Merangin telah menetapkan berbagai upaya dalam bentuk kebijakan dan strategi. Kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan Badan Pengelola Pajak dan Rertibusi Daerah diarahkan dalam rangka mewujudkan pengelolaan penerimaan asli daerah yang handal dan terbaik se Indonesian. Melalui visi tersebut dapat mendukung Pemerintah Kabupaten Merangin meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Daerah. Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Mengupayakan terwujudnya system dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang bertumpu pada kepentingan masyarakat yang didukung oleh sarana prasarana dan SDM yang berkualitas;
- b. Optimalisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah;
- c. Optimalisasi tata kelola pelayanan pajak dan retribusi yang berkualitas; dan
- d. Implementasi Sistem Manajemen Pendapatan Asli Daerah yang terintegrasi.

## **2. Kebijakan**

Beberapa upaya strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Rertibusi Daerah, Daerah dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program kegiatan.. Berdasarkan tujuan, sasaran dan kebijakan sebagaimana telah diuraikan diatas Dinas Pendapatan Daerah telah menetapkan target sasaran capaian kinerja sebagai indikator dan instrumen pencapaian visi dan misi yaitu sebagai berikut :

*Tabel IV*  
**Indikator Kinerja Daerah dan Proyeksi Capaian**  
**Dispenda Kab. Merangin 2014-2018**

No	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					2014	2015	2016	2017	2018	
1	Meningkatkan Kualitas pelayanan birokrasi dengan mengedepankan transparansi, Efisiensi, Efektifitas dan akuntabilitas ngkatkan	1. Peningkatan Akuntabilitas kinerja Organisasi Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan	1. Persentase peyediaan pelayanan Admidtrasi perkantoran	90%	91%	92%	93%	94%	95%	95%
			2. Rata-Rata persentase sarana dan prasarana pendukung kerja aparatur yang disediakan	75%	80%	82%	83%	84%	85%	85%
			3. Rata-rata persentase sarana dan prasarana pendukung kerja aparatatur yang disediakan	75%	80%	82%	83%	84%	85%	85%
			4. Persentase peningkatan jabatan fungsional tertentu	20%	25%	28%	31%	36%	40%	40%
		2. Peningkatan Kualitas dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Nilai sakaip 2. Persentase tingkat keselarasan RKPd terhadap RPJMD	C 60%	C 60%	C 70%	C 70%	C 80%	B 95%	B 95%
		3. Pendataan dan pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis sisten informasi manajemen keuangan daerah secara elektronik	1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak daerah	85%	87%	89%	90%	91%	92%	92%
		4. peningkatan Sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN dan bikenerja baik	1 Jumlah peyelenggaraan pameran yang diikuti 2. Persentase kenaikan pendapatan daerah	1 kali 20%	1 kali -	1 kali 2%	1 kali 1%	1 kali 1%	1 kali 1%	5 kali 25%

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,**  
**KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAN INDIKATIF**

Program pembangunan dan rencana kegiatan indikatif yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Merangin tahun 2014-2018 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Badan Pengelola Pajak dan Rertibusi Daerah Kabupaten Merangin sebagai Dinas teknis yang mempunyai tugas sangat berat terkait dengan dinamis dan kompleknya permasalahan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Merangin. Badan Pengelola Pajak dan Rertibusi Daerah Kabupaten Merangin berencana melaksanakan Program dan kegiatan dengan alokasi dana direncanakan dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Rertibusi Daerah Kabupaten Merangin selama kurun waktu lima tahun disajikan dalam matriks tabel 15 Berikut ini:



**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH**  
**YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**  
**KABUPATEN MERANGIN**

Indikator kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Merangin.

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

*Tabel 6.1*

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2013)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2019)
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Penyediaan pelayanan Administrasi perkantoran	90%	91%	92%	93%	94%	95%	95%
2	Rata-rata persentase sarana dan prasarana pendukung kerja aparatur yang disediakan	75%	80%	82%	83%	84%	85%	85%
3	Rata-rata persentase sarana dan prasarana pendukung kerja aparatur yang disediakan	75%	80%	82%	83%	84%	85%	85%
4	Persentase peningkatan jabatan Fungsional Tertentu	20%	25%	28%	31%	36%	40%	40%
5	Nilai saki	c	c	c	c	c	b	b
6	Persentase tingkat keselarasan RKPd terhadap RPJMD	60%	65%	70%	75%	80%	95%	95%
7	Jumlah penyelenggaraan pameran yang diikuti	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	5 Kali

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2013)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2019)
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Tingkat partisipasi Masyarakat dalam pembayaran Pajak daerah	85%	87%	89%	90%	91%	92%	92%

Tabel 6.2

### Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2013)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2019)
				2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peningkatan Sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN dan berkinerja baik	Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah	20%	-	2%	1%	1%	1%	25%

Berdasarkan indikator Kinerja Utama di atas maka terdapat program yang menjadi prioritas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2014-2018, yaitu *Program Optimalisasi Penerimaan Daerah*.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan
7. Program Visualisasi Hasil Pembangunan
8. Program Optimalisasi Penerimaan Daerah

## **BAB VII**

### **P E N U T U P**

Dengan tersusunnya Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin guna memenuhi tuntutan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kabupaten Merangin Tahun Tahun 2014 – 2018, maka dengan ini diharapkan menjadi acuan dan pedomanan bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin beserta jajarannya di dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD serta menjadi pelaksanaan pencapaian target-target visi misi RPJMD 2014-2018.

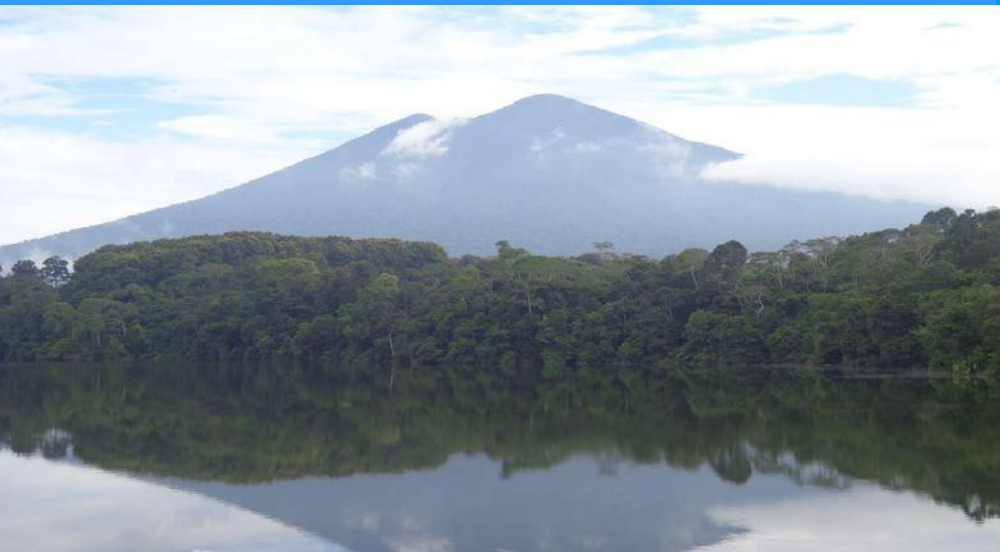
Disamping itu pula sebagai bahan masukan/input dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin serta dapat juga memberikan motivasi bagi seluruh jajaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin untuk melaksanakan tugas sesuai fungsinya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang terukur, rasional, implementasi, sinergis dan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Bangko,        Agustus 2017

**KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH**

**Drs. AMIR ACHMAD**  
PEMBINA UTANA MUDA (IV/c)  
NIP. 19670413 199603 1 003

# REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016



**BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN MERANGIN  
TAHUN ANGGARAN 2016**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya, sehingga terlaksananya penyusunan Revisi **Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 – 2018**.

Rencana strategis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin memuatkan yang diawali dengan pendahuluan, tugas dan fungsi, gambaran umum kondisi daerah, visi, misi, tujuan sasaran, strategi, program, kegiatan dan matriks lampiran merupakan bahagian yang takterpisahkan. Rencana strategis ini disusun sebagai pedoman dalam rangka untuk menetapkan kebijakan, serta langkah-langkah program prioritas Pengoptimalisasian Penerimaan Daerah periodetahun 2014–2018 di Kabupaten Merangin.

Demikian dan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan rencana strategis ini kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Bangko, Desember 2016

**KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN  
RETRUBUSI DAERAH**

**Drs.AMIN ACHMAD**  
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)  
NIP. 19670413 199603 1 003

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	vi
DAFTAR GRAFIK .....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	vii
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	3
C. Maksud dan Tujuan .....	5
D. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II      GAMBARAN PELAYANAN SKPD .....</b>	<b>10</b>
A. Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin.....	10
B. Sumber daya badan Pengelola Pajak dan Retribusi.....	13
C. Daerah .....	17
Sarana dan Prasarana Kerja.....	17
<b>BAB III     ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....</b>	<b>23</b>
A. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah .....	23
B. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	26
C. Telaahan RencanaTata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	37
D. Penentuan Isu-isu Strategis .....	41
<b>BAB IV     VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....</b>	<b>44</b>
A. Visi dan Misi .....	44
B. Tujuan Dan Sasaran .....	45
C. Strategi dan Kebijakan Badan Penfelola Pajak dan Retribusi Daerah	45
<b>BAB V      RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAN INDIKATIF .....</b>	<b>48</b>

<b>BAB VI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN MERANGIN .....</b>	<b>49</b>
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>51</b>

#### DAFTAR TABEL

<i>Tabel</i>	<i>Halaman</i>
1. <i>Data Pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin Berdasarkan Golongan Tahun 2014.....</i>	13
2. <i>Data Pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Merangin Berdasarkan Pendidikan Tahun 2014.....</i>	13
3. <i>Data Nama Dan Golongan Pegawai Badan Pengelola Pajak dan Rerubusi Daerah Kab. Merangin Tahun 2014.....</i>	14
4. <i>Data Aset Badan Pengelola Pajak dan Reribusi Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014.....</i>	16
5. <i>MatrikIdentifikasi Permasalahan Pelaksanaan Pelayanan SKPD Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajakdan Reribusi Daerah.....</i>	42
6. <i>Misi1 KabupatenMerangin.....</i>	22
7. <i>Misi 2KabupatenMerangin.....</i>	23
8. <i>Misi 3KabupatenMerangin.....</i>	24
9. <i>Misi 4KabupatenMerangin.....</i>	26
10. <i>Misi 5KabupatenMerangin.....</i>	27
11. <i>Misi6 KabupatenMerangin.....</i>	28
12. <i>HubunganVisi, Misi, dan Program Kabupaten MerangindenganTupoksi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin.....</i>	29





13.	<i>Telaahan RTRW Kabupaten MeranginterhadapPelayanan Badan Pengelola Pajak dan retribusi Daerah Kab.Merangin.....</i>	30
14.	<i>IndikatorKinerja Daerah danProyeksiCapaian BPPRD Kab. Merangin 2014-2018.....</i>	40
15.	<i>Rancangan Program dan Kegiatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kabupaten Merangin.....</i>	41
16.	<i>Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi DaerahKabupaten Merangin.....</i>	50

### **DAFTAR GAMBAR**

<i>Gambar</i>		<i>Halaman</i>
1	<i>Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....</i>	2
2	<i>Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daera .....</i>	12

Tabel 15

**RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rek	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2013																				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Perencanaan		SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	volume	satuan	Rp.										
						volume	satuan		volume	satuan		volume	satuan		volume	satuan		volume	satuan		volume	satuan		volume	satuan					volume	satuan								
						%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%														
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah	Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	XX.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	90	%	0	91	%	1,414,585,000	92	%	1,248,550,540	93	%	1,890,650,000	94	%	1,789,877,500	95	%	2,149,560,000	95	%	8,493,223,040													
			XX.XX.01.01	753 Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah dokumen, surat yang diselesaikan	0	surat	Rp.0	1800	surat	5,000,000	1900	surat	5,150,540	2000	surat	3,000,000	2100	surat	3,000,000	2200	surat	3,300,000	10000	surat	19,450,540	DISPENDA	DISPENDA											
			XX.XX.01.02	754 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	bulan	Rp.0	12	bulan	630,000,000	12	bulan	93,300,000	12	bulan	196,400,000	12	bulan	195,000,000	12	bulan	210,000,000	60	bulan	1,324,700,000	DISPENDA	DISPENDA											
			XX.XX.01.03	755 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terfungsikan pajaknya	0	unit	Rp.0	12	unit	88,725,000	12	unit	30,000,000	12	unit	30,000,000	21	unit	32,600,000	25	unit	35,000,000	82	unit	216,325,000	DISPENDA	DISPENDA											
			XX.XX.01.04	756 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	0	bulan	Rp.0	12	bulan	88,725,000	12	bulan	140,700,000	12	bulan	119,400,000	16	bulan	98,400,000	16	bulan	150,000,000	68	bulan	597,225,000	DISPENDA	DISPENDA											
			XX.XX.01.05	757 Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya jasa kebersihan kantor	0	bulan	Rp.0	12	bulan	18,000,000	12	bulan	20,000,000	12	bulan	20,000,000	12	bulan	20,000,000	12	bulan	23,760,000	60	bulan	101,760,000	DISPENDA	DISPENDA											
			XX.XX.01.06	758 Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	tersedianya tenaga administrasi dan teknis perkantoran	0	orang	Rp.0	15	orang	69,450,000	75	orang	434,400,000	75	orang	531,600,000	71	orang	517,200,000	79	orang	585,200,000	315	orang	2,137,850,000	DISPENDA	DISPENDA											
			XX.XX.01.07	759 Jasa Jaminan Kesehatan Non PNS	tersedianya polis dan kartu asuransi jiwa uraian kesehatan bagi tenaga kerja kontrak melalui bpjs	0	orang	Rp.0	0	orang	0	0	orang	0	0	orang	0	0	orang	0	79	orang	20,000,000	79	orang	20,000,000	DISPENDA	DISPENDA											
			XX.XX.01.08	760 Jasa Jaminan Ketenagakerjaan Non PNS	tersedianya polis dan kartu asuransi jiwa uraian ketenagakerjaan bagi tenaga kerja kontrak melalui bpjs	0	Orang	Rp.0	0	Orang	0	0	Orang	0	0	Orang	0	0	Orang	0	79	Orang	20,000,000	79	Orang	20,000,000	DISPENDA	DISPENDA											
			XX.XX.01.09	761 Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	0	bulan	Rp.0	12	bulan	111,870,000	12	bulan	110,000,000	12	bulan	66,400,000	12	bulan	50,000,000	12	bulan	80,000,000	60	bulan	418,270,000	DISPENDA	DISPENDA											

			XX.XX.01.10	762	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan pengandaan	penyediaan barang cetakan dan pengadaan pengandaan	0	jenis	Rp.0	1	jenis	83,600,000	1	jenis	119,000,000	1	jenis	117,650,000	1	jenis	118,100,000	1	jenis	140,000,000	5	jenis	578,350,000	DISPENSA	DISPENSA
			XX.XX.01.11	763	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah jenis komponen instalasi listrik yang diadakan	0	jenis	Rp.0	12	jenis	20,000,000	12	jenis	22,000,000	12	jenis	24,200,000	10	jenis	30,100,000	10	jenis	40,000,000	56	jenis	136,300,000	DISPENSA	DISPENSA
			XX.XX.01.12	764	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang diadakan	0	media massa	Rp.0	64	media massa	35,000,000	69	media massa	35,000,000	74	media massa	52,000,000	35	media massa	55,000,000	50	media massa	67,000,000	292	media massa	244,000,000	DISPENSA	DISPENSA
			XX.XX.01.13	765	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman pegawai/pasien/tamu	0	bulan	Rp.0	12	bulan	64,215,000	12	bulan	50,000,000	12	bulan	60,000,000	12	bulan	100,200,000	12	bulan	130,000,000	60	bulan	404,415,000	DISPENSA	DISPENSA
			XX.XX.01.14	766	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	prekuensi rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	0	kali	Rp.0	50	kali	180,000,000	50	kali	174,000,000	100	kali	400,000,000	100	kali	395,000,000	100	kali	420,000,000	400	kali	1,569,000,000	DISPENSA	DISPENSA
			XX.XX.01.15	767	Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Dalam Daerah	prekuensi koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah yang dilaksanakan	0	kali	Rp.0	50	kali	20,000,000	35	kali	15,000,000	200	kali	270,000,000	175	kali	175,277,500	150	kali	225,300,000	610	kali	705,577,500	DISPENSA	DISPENSA
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan	Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	XX.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	75	%	0	80	%	584,550,000	82	%	911,905,000	83	%	1,341,455,500	84	%	897,900,000	85	%	4,433,000,000	85	%	8,168,810,500			
			XX.XX.02.01	1273	Pembangunan gedung kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dibangun	0	Unit	Rp.0	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	8	Unit	3,000,000,000	8	Unit	3,000,000,000	DISPENSA	DISPENSA
			XX.XX.02.05	1277	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan	0	Unit	Rp.0	12	Unit	246,400,000	12	Unit	271,040,000	12	Unit	298,144,000	5	Unit	354,000,000	1	Unit	650,000,000	42	Unit	1,819,584,000	DISPENSA	DISPENSA
			XX.XX.02.06	1278	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	0	Unit	Rp.0	0	Unit	0	12	Unit	76,000,000	12	Unit	261,000,000	9	Unit	86,500,000	12	Unit	120,000,000	57	Unit	543,500,000	DISPENSA	DISPENSA
			XX.XX.02.08	1280	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang diadakan	0	Unit	Rp.0	0	Unit	0	1	Unit	55,700,000	1	Unit	25,000,000	1	Unit	21,000,000	10	Unit	115,000,000	13	Unit	216,700,000	DISPENSA	DISPENSA
			XX.XX.02.11	1283	Pengadaan meubeler	Jumlah Meubeler yang diadakan	0	Unit	Rp.0	0	Unit	0	1	Unit	71,500,000	1	Unit	78,650,000	12	Unit	31,000,000	10	Unit	120,000,000	24	Unit	301,150,000	DISPENSA	DISPENSA
			XX.XX.02.12	1284	Pengadaan komputer	Jumlah perangkat komputer yang disediakan	0	Unit	Rp.0	12	Unit	185,650,000	12	Unit	204,215,000	12	Unit	224,636,500	5	Unit	66,900,000	8	Unit	70,000,000	49	Unit	751,401,500	DISPENSA	DISPENSA
			XX.XX.02.15	1287	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	0	Unit	Rp.0	12	Unit	50,000,000	12	Unit	55,000,000	18	Unit	75,000,000	21	Unit	82,200,000	25	Unit	103,000,000	88	Unit	365,200,000	DISPENSA	DISPENSA

			XX.XX.02.16	1288	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0	Unit	Rp.0	0	Unit	0	22	Unit	65,700,000	22	Unit	255,000,000	4	Unit	206,300,000	22	Unit	150,000,000	70	Unit	677,000,000	DISPENSA	DISPENSA
			XX.XX.02.19	1291	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	0	unit	Rp.0	12	unit	77,500,000	12	unit	85,250,000	12	unit	93,775,000	103	unit	50,000,000	110	unit	60,000,000	249	unit	366,525,000	DISPENSA	DISPENSA
			XX.XX.02.23	1378	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	0	Unit	Rp.0	12	Unit	25,000,000	12	Unit	27,500,000	12	Unit	30,250,000	0	Unit	0	1	Unit	45,000,000	37	Unit	127,750,000	DISPENSA	DISPENSA
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan	Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	XX.XX.05		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	75	%	0	80	%	0	82	%	56,000,000	83	%	76,000,000	84	%	91,700,000	85	%	187,000,000	85	%	410,700,000		
			XX.XX.05.01	1304	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas dan atributnya yang disediakan	0	Stel	Rp.0	0	Stel	0	105	Stel	56,000,000	125	Stel	76,000,000	130	Stel	91,700,000	135	Stel	187,000,000	495	Stel	410,700,000	DISPENSA	DISPENSA
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan	Persentase peningkatan jabatan fungsional tertentu	XX.XX.04		Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase peningkatan jabatan fungsional tertentu	20	%	0	25	%	238,230,000	28	%	262,053,000	31	%	288,258,300	36	%	225,000,000	40	%	357,000,000	40	%	1,370,541,300		
			XX.XX.04.02	1301	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Personil Yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	0	Orang	Rp.0	12	Orang	25,000,000	12	Orang	27,500,000	12	Orang	30,250,000	0	Orang	0	12	Orang	40,000,000	48	Orang	122,750,000	DISPENSA	DISPENSA
			XX.XX.04.03	1302	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek Teknis Fungsional	0	Orang	Rp.0	12	Orang	200,000,000	12	Orang	220,000,000	12	Orang	242,000,000	60	Orang	225,000,000	45	Orang	270,000,000	141	Orang	1,157,000,000	DISPENSA	DISPENSA
			XX.XX.04.16	1483	Pelatihan Panyusunan SKP	Jumlah Peserta Pelatihan Panyusunan SKP	0	orang	Rp.0	12	orang	13,230,000	12	orang	14,553,000	12	orang	16,008,300	0	orang	0	12	orang	47,000,000	48	orang	90,791,300	DISPENSA	DISPENSA
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Nilai SAKIP	XX.XX.03		Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	C		0	C	0	C	34,250,000	C	53,950,000	C	43,737,500	B	86,700,000	B	218,637,500								

			XX.XX.03.01	1293	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	0	Dokumen	Rp.0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	17,125,000	1	Dokumen	14,050,000	1	Dokumen	14,337,500	1	Dokumen	17,000,000	4	Dokumen	62,512,500	DISPENSA	DISPENSA
			XX.XX.03.03	1295	Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD	Jumlah dokumen Laporan Aset SKPD yang disusun	0	dokumen	Rp.0	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0	dokumen	0	1	dokumen	29,000,000	1	dokumen	29,000,000	DISPENSA	DISPENSA
			XX.XX.03.04	1296	Penyusunan Laporan Tahunan	Jumlah laporan tahunan yang disusun	0	Dokumen	Rp.0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	22,200,000	1	Dokumen	22,200,000	1	Dokumen	11,400,000	1	Dokumen	20,000,000	3	Dokumen	53,600,000	DISPENSA	DISPENSA
			XX.XX.03.05	1298	Penyusunan laporan keuangan semester	Jumlah laporan keuangan semester yang disusun	0	Dokumen	Rp.0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	17,125,000	1	Dokumen	17,700,000	1	Dokumen	18,000,000	1	Dokumen	20,700,000	4	Dokumen	73,525,000	DISPENSA	DISPENSA
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	XX.XX.06	Program peningkatan tingkat keselarasan Sistem Perencanaan	Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	60	%	0	65	%	51,010,000	70	%	52,750,000	75	%	54,600,000	80	%	57,050,000	95	%	65,750,000	95	%	281,160,000			
			XX.XX.06.01	1306	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen rencana kerja SKPD selama 5 tahun	0	Dokumen	Rp.0	1	Dokumen	28,050,000	1	Dokumen	16,925,000	1	Dokumen	14,550,000	1	Dokumen	14,450,000	1	Dokumen	16,400,000	5	Dokumen	90,375,000	DISPENSA	DISPENSA
			XX.XX.06.02	1307	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	Jumlah dokumen Rencana Kerja Tahunan yang disusun	0	Dokumen	Rp.0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	16,925,000	1	Dokumen	14,650,000	1	Dokumen	14,550,000	1	Dokumen	16,700,000	4	Dokumen	62,825,000	DISPENSA	DISPENSA
			XX.XX.06.03	1308	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun	0	Dokumen	Rp.0	1	Dokumen	22,960,000	1	Dokumen	18,900,000	1	Dokumen	25,400,000	1	Dokumen	28,050,000	1	Dokumen	32,650,000	5	Dokumen	127,960,000	DISPENSA	DISPENSA
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Peningkatan Sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN dan berkinerja baik	Jumlah Penyelenggara Pameran Yang diikuti	XX.XX.07	Program Visualisasi Hasil Pembangunan	Jumlah Penyelenggaraan Pameran Yang diikuti	1	Kali	0	1	Kali	63,700,000	1	Kali	74,025,000	1	Kali	66,200,000	1	Kali	48,700,000	1	Kali	49,600,000	5	Kali	302,225,000			
			XX.XX.07.01	1313	Penyediaan dan Pameran Publikasi Pembangunan	Penyelenggaraan pameran publikasi pembangunan	0	Kali	Rp.0	1	Kali	63,700,000	1	Kali	74,025,000	1	Kali	66,200,000	2	Kali	48,700,000	2	Kali	49,600,000	7	Kali	302,225,000	DISPENSA	DISPENSA
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Penataan sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis Sistem Informasi Manajemen keuangan Daerah secara elektronik	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Daerah	04.02.05	Program Optimalisasi Penerimaan Daerah	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Daerah	85	%	0	87	%	776,969,400	89	%	1,823,893,840	90	%	2,353,796,000	91	%	1,786,035,000	92	%	2,684,430,400	92	%	9,425,124,640			
			04.02.05.01	1498	Penetapan pajak PBB dan BPHTB	Target PBB yang Terpagih	0	kali	Rp.0	200	kali	66,350,000	200	kali	101,251,400	200	kali	47,820,000	0	kali	0	200	kali	120,000,000	800	kali	335,421,400	DISPENSA	DISPENSA
			04.02.05.02	1519	Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB	terlaksananya program monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB	0	Kali	Rp.0	24	Kali	63,450,000	24	Kali	109,001,800	24	Kali	46,766,000	4	Kali	58,966,000	4	Kali	65,000,000	80	Kali	343,183,800	DISPENSA	DISPENSA

04.02.05.03	1628 Penerbitan SPPT dan DHKP PBB	Jumlah SPPT dan DHKP PBB yang diterbitkan	0	Wajib Pajak	Rp.0	12	Wajib Pajak	124,685,000	12	Wajib Pajak	236,816,000	12	Wajib Pajak	310,150,000	5000	Wajib Pajak	120,000,000	5300	Wajib Pajak	160,000,000	10336	Wajib Pajak	951,651,000	DISPENSA	DISPENSA
04.02.05.04	1629 Penyampaian DHKP dan SPPT PBB	Jumlah DHKP dan SPT PBB yang Didistribusikan	0	Wajib Pajak	Rp.0	24	Wajib Pajak	44,000,000	24	Wajib Pajak	74,240,400	24	Wajib Pajak	42,240,000	24	Wajib Pajak	78,615,000	24	Wajib Pajak	78,615,000	120	Wajib Pajak	317,710,400	DISPENSA	DISPENSA
04.02.05.05	1630 Identifikasi dan verifikasi wajib pajak dan retribusi daerah	Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi pajak dan retribusi daerah	0	Kali	Rp.0	24	Kali	71,170,000	24	Kali	162,800,000	24	Kali	179,080,000	12	Kali	93,100,000	24	Kali	103,800,000	108	Kali	609,950,000	DISPENSA	DISPENSA
04.02.05.06	1631 Penerbitan dan penyampaian Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah	Penerbitan SPKPRD/ SKPRD dan penyampaian dan pelayanan terhadap WP/WR	0	Dokumen	Rp.0	1	Dokumen	86,467,200	1	Dokumen	95,113,920	1	Dokumen	107,134,000	1	Dokumen	143,000,000	1	Dokumen	143,000,000	5	Dokumen	574,715,120	DISPENSA	DISPENSA
04.02.05.07	1632 Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah	Pelaksanaan monitoring dan rapat evaluasi penerimaan pajak dan retribusi daerah	0	Kali	Rp.0	24	Kali	47,550,000	24	Kali	52,305,000	24	Kali	63,900,000	4	Kali	38,200,000	4	Kali	45,000,000	80	Kali	246,955,000	DISPENSA	DISPENSA
04.02.05.08	1633 Penagihan pajak dan retribusi daerah	Pelaksanaan penagihan pajak dan retribusi daerah	0	Kali	Rp.0	1000	Kali	93,297,200	1000	Kali	102,626,920	1000	Kali	83,800,000	1000	Kali	125,550,000	1000	Kali	149,000,000	5000	Kali	554,274,120	DISPENSA	DISPENSA
04.02.05.09	1634 Rekonsiliasi penerimaan daerah	Laporan Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil dan Transfer Daerah	0	Dokumen	Rp.0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	88,560,000	1	Dokumen	61,900,000	1	Dokumen	49,300,000	1	Dokumen	63,900,000	4	Dokumen	263,660,000	DISPENSA	DISPENSA
04.02.05.10	1635 Penyusunan pelaporan rekapitulasi PAD	Laporan Rekapitulasi PAD Kabupaten Merangin	0	Dokumen	Rp.0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	106,900,000	1	Dokumen	70,600,000	1	Dokumen	39,740,000	1	Dokumen	39,740,000	4	Dokumen	256,980,000	DISPENSA	DISPENSA
04.02.05.11	1636 Pelayanan pendaftaran objek dan subjek pajak PBB DAN BPHTB	Peningkatan Objek PBB dan BPHTB	0	Wajib Pajak	Rp.0	0	Wajib Pajak	0	5500	Wajib Pajak	51,748,400	5700	Wajib Pajak	48,266,000	0	Wajib Pajak	0	6000	Wajib Pajak	103,000,000	17200	Wajib Pajak	203,014,400	DISPENSA	DISPENSA
04.02.05.12	1637 Verifikasi dan validasi piutang PBB P2	Tersedianya data rincian saldo piutang PBBP2	0	Dokumen	Rp.0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	184,550,000	1	Dokumen	140,750,000	1	Dokumen	91,850,000	1	Dokumen	91,850,000	4	Dokumen	509,000,000	DISPENSA	DISPENSA
04.02.05.13	1638 Pembuatan kartu dan identitas wajib pajak dan retribusi	Jumlah Kartu identitas WP/WR	0	Kartu	Rp.0	0	Kartu	0	2800	Kartu	136,000,000	3000	Kartu	66,140,000	0	Kartu	0	0	Kartu	0	5800	Kartu	202,140,000	DISPENSA	DISPENSA
04.02.05.14	1639 Pelayanan pendaftaran dan pembayaran pajak dan retribusi daerah	Jumlah Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang Dilayani	0	WP/WR	Rp.0	0	WP/WR	0	4500	WP/WR	127,780,000	4700	WP/WR	81,500,000	5000	WP/WR	108,900,000	2000	WP/WR	90,000,000	16200	WP/WR	408,180,000	DISPENSA	DISPENSA
04.02.05.16	1641 Pangelolaan data wajib pajak dan wajib retribusi daerah	Data wajib pajak dan retribusi daerah	0	Dokumen	Rp.0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	80,200,000	1	Dokumen	67,700,000	1	Dokumen	67,700,000	3	Dokumen	215,600,000	DISPENSA	DISPENSA

04.02.05.17	1642 Rapat koordinasi penerimaan bidang pajak, retribusi dan penerimaan lainnya	Target Penerimaan Bidang Pajak, Retribusi dan Penerimaan Lainnya yang Dicapai	0	kali	Rp.0	4	kali	180,000,000	0	kali	0	4	kali	43,200,000	0	kali	0	0	kali	0	8	kali	223,200,000	DISPENSA	DISPENSA
04.02.05.18	1643 Penataan Objek retribusi pasar	Frekwensi Penataan Objek Retribusi Pasar	0	Kali	Rp.0	0	Kali	0	0	Kali	0	4	Kali	33,400,000	4	Kali	38,100,000	4	Kali	49,000,000	12	Kali	120,500,000	DISPENSA	DISPENSA
04.02.05.19	1644 Pemuktahiran data ZNT NIR	Update Data Base Zona Nilai Tanah Nilai Indikasi Rata-Rata	0	Data Base	Rp.0	0	Data Base	0	0	Data Base	0	12	Data Base	62,466,000	1	Data Base	49,400,000	1	Data Base	49,400,000	14	Data Base	161,266,000	DISPENSA	DISPENSA
04.02.05.20	1645 Penyempaian SPT pajak dan retribusi daerah	Jumlah SPT Pajak dan Retribusi Daerah yang Terdistribusi	0	WP/WR	Rp.0	0	WP/WR	0	0	WP/WR	0	2800	WP/WR	107,134,000	0	WP/WR	0	3000	WP/WR	120,000,000	5800	WP/WR	227,134,000	DISPENSA	DISPENSA
04.02.05.21	1646 Penerbitan wajib pajak dan wajib retribusi	Frekwensi Penerbitan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi	0	Kali	Rp.0	0	Kali	0	4	Kali	194,200,000	4	Kali	151,736,000	4	Kali	48,000,000	4	Kali	50,600,000	16	Kali	444,536,000	DISPENSA	DISPENSA
04.02.05.22	1647 Pengelolaan teknologi informasi PAD	Jumlah sistem informasi dan database management PAD yang dipelihara	0	Sitem Informasi	Rp.0	0	Sitem Informasi	0	0	Sitem Informasi	0	1	Sitem Informasi	142,100,000	1	Sitem Informasi	289,400,000	1	Sitem Informasi	200,000,000	3	Sitem Informasi	631,500,000	DISPENSA	DISPENSA
04.02.05.23	1648 Pembinaan wajib retribusi pasar dan kebersihan pasar	Jumlah Wajib Retribusi dan Kebersihan Pasar yang Dibina	0	Wajib Retribusi	Rp.0	0	Wajib Retribusi	0	0	Wajib Retribusi	0	0	Wajib Retribusi	0	0	Wajib Retribusi	0	1000	Wajib Retribusi	100,000,000	1000	Wajib Retribusi	100,000,000	DISPENSA	DISPENSA
04.02.05.24	1649 Pemuktahiran data objek pajak dan subjek pajak PBB	Database objek pajak dan subjek pajak PBB	0	Dokumen	Rp.0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	345,014,000	1	Dokumen	103,914,000	1	Dokumen	114,305,400	3	Dokumen	563,233,400	DISPENSA	DISPENSA
04.02.05.25	1650 Penyusunan dan penyempurnaan regulasi penerimaan pajak dan retribusi	Jumlah regulasi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang disusun	0	Perda/Perbup	Rp.0	0	Perda/Perbup	0	0	Perda/Perbup	0	24	Perda/Perbup	38,500,000	0	Perda/Perbup	0	0	Perda/Perbup	0	24	Perda/Perbup	38,500,000	DISPENSA	DISPENSA
04.02.05.26	1651 Sosialisasi dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan tentang pajak dan retribusi daerah	Frekuensi sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pajak dan retribusi daerah	0	Kali	Rp.0	0	Kali	0	0	Kali	0	0	Kali	0	4	Kali	134,700,000	4	Kali	142,000,000	12	Kali	276,700,000	DISPENSA	DISPENSA
04.02.05.27	1652 Pendataan dan penyempurnaan SPT Pajak dan Retribusi daerah	Jumlah SPT Pajak dan Retribusi daerah yang didata	0	WP/WR	Rp.0	0	WP/WR	0	0	WP/WR	0	0	WP/WR	0	2000	WP/WR	107,600,000	1500	WP/WR	100,000,000	3500	WP/WR	207,600,000	DISPENSA	DISPENSA
04.02.05.28	1658 uji petik objek dan subjek pajak daerah	jumlah data objek pajak yang diujikan	0	wp/wr	Rp.0	0	wp/wr	0	0	wp/wr	0	0	wp/wr	0	0	wp/wr	0	56	wp/wr	78,520,000	56	wp/wr	78,520,000	DISPENSA	DISPENSA
04.02.05.30	1669 pemeriksaan penelitian dan verifikasi pajak dan retribusi daerah	frekwensi pelaksanaan pemeriksaan, penelitian dan verifikasi pajak dan retribusi daerah	0	kali	Rp.0	0	kali	0	0	kali	0	0	kali	0	0	kali	0	4	kali	90,000,000	4	kali	90,000,000	DISPENSA	DISPENSA

	04.02.05.31	1870 pengajuan/ pemrosesan keberatan dan pengurangan pajak dan retribusi daerah	jumlah pengajuan/ pemrosesan keberatan dan pengurangan pajak dan retribusi daerah yang terselesaikan	0	wp/wr	Rp.0	0	wp/wr	0	0	wp/wr	0	0	wp/wr	0	0	wp/wr	0	1000	wp/wr	60,000,000	1000	wp/wr	60,000,000	DISPENDA	DISPENDA
	04.02.05.32	1871 penilaian PBB sektor menara telekomunikasi (BTS/Tower)	pelaksanaan penilaian PBB sektor menara telekomunikasi (BTS/Tower)	0	kali	Rp.0	0	kali	0	0	kali	0	0	kali	0	0	kali	0	10	kali	80,000,000	10	kali	80,000,000	DISPENDA	DISPENDA
	04.02.05.33	1872 pengelolaan dan penerbitan surat pemberitahuan pajak dan retribusi daerah	jumlah surat pemberitahuan pajak dan retribusi daerah yang terkelola dan diterbitkan	0	wp/wr	Rp.0	0	wp/wr	0	0	wp/wr	0	0	wp/wr	0	0	wp/wr	0	2000	wp/wr	130,000,000	2000	wp/wr	130,000,000	DISPENDA	DISPENDA



Tabel 15

**RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rek	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2013																				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Perencanaan		SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.										
						volume	satuan		volume	satuan		volume	satuan		volume	satuan		volume	satuan		volume	satuan		volume	satuan		volume	satuan		volume	satuan								
						%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%											
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah	Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	XX.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	90	%	0	91	%	1,414,585,000	92	%	1,248,550,540	93	%	1,890,650,000	94	%	1,789,877,500	95	%	2,149,560,000	95	%	8,493,223,040													
			XX.XX.01.01	753 Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah dokumen, surat yang diselesaikan	0	surat	Rp.0	1800	surat	5,000,000	1900	surat	5,150,540	2000	surat	3,000,000	2100	surat	3,000,000	2200	surat	3,300,000	10000	surat	19,450,540	DISPENDA	DISPENDA											
			XX.XX.01.02	754 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	bulan	Rp.0	12	bulan	630,000,000	12	bulan	93,300,000	12	bulan	196,400,000	12	bulan	195,000,000	12	bulan	210,000,000	60	bulan	1,324,700,000	DISPENDA	DISPENDA											
			XX.XX.01.03	755 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terfungsikan pajaknya	0	unit	Rp.0	12	unit	88,725,000	12	unit	30,000,000	12	unit	30,000,000	21	unit	32,600,000	25	unit	35,000,000	82	unit	216,325,000	DISPENDA	DISPENDA											
			XX.XX.01.04	756 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	0	bulan	Rp.0	12	bulan	88,725,000	12	bulan	140,700,000	12	bulan	119,400,000	16	bulan	98,400,000	16	bulan	150,000,000	68	bulan	597,225,000	DISPENDA	DISPENDA											
			XX.XX.01.05	757 Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya jasa kebersihan kantor	0	bulan	Rp.0	12	bulan	18,000,000	12	bulan	20,000,000	12	bulan	20,000,000	12	bulan	20,000,000	12	bulan	23,760,000	60	bulan	101,760,000	DISPENDA	DISPENDA											
			XX.XX.01.06	758 Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	tersedianya tenaga administrasi dan teknis perkantoran	0	orang	Rp.0	15	orang	69,450,000	75	orang	434,400,000	75	orang	531,600,000	71	orang	517,200,000	79	orang	585,200,000	315	orang	2,137,850,000	DISPENDA	DISPENDA											
			XX.XX.01.07	759 Jasa Jaminan Kesehatan Non PNS	tersedianya polis dan kartu asuransi jiwa uraian kesehatan bagi tenaga kerja kontrak melalui bpjs	0	orang	Rp.0	0	orang	0	0	orang	0	0	orang	0	0	orang	0	79	orang	20,000,000	79	orang	20,000,000	DISPENDA	DISPENDA											
			XX.XX.01.08	760 Jasa Jaminan Ketenagakerjaan Non PNS	tersedianya polis dan kartu asuransi jiwa uraian ketenagakerjaan bagi tenaga kerja kontrak melalui bpjs	0	Orang	Rp.0	0	Orang	0	0	Orang	0	0	Orang	0	0	Orang	0	79	Orang	20,000,000	79	Orang	20,000,000	DISPENDA	DISPENDA											
			XX.XX.01.09	761 Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	0	bulan	Rp.0	12	bulan	111,870,000	12	bulan	110,000,000	12	bulan	66,400,000	12	bulan	50,000,000	12	bulan	80,000,000	60	bulan	418,270,000	DISPENDA	DISPENDA											

			XX.XX.01.10	762	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	penyediaan barang cetakan dan pengandaan	0	jenis	Rp.0	1	jenis	83,600,000	1	jenis	119,000,000	1	jenis	117,650,000	1	jenis	118,100,000	1	jenis	140,000,000	5	jenis	578,350,000	DISPENDA	DISPENDA
			XX.XX.01.11	763	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah jenis komponen instalasi listrik yang diadakan	0	jenis	Rp.0	12	jenis	20,000,000	12	jenis	22,000,000	12	jenis	24,200,000	10	jenis	30,100,000	10	jenis	40,000,000	56	jenis	136,300,000	DISPENDA	DISPENDA
			XX.XX.01.12	764	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang diadakan	0	media massa	Rp.0	64	media massa	35,000,000	69	media massa	35,000,000	74	media massa	52,000,000	35	media massa	55,000,000	50	media massa	67,000,000	292	media massa	244,000,000	DISPENDA	DISPENDA
			XX.XX.01.13	765	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman pegawai/pasien/tamu	0	bulan	Rp.0	12	bulan	64,215,000	12	bulan	50,000,000	12	bulan	60,000,000	12	bulan	100,200,000	12	bulan	130,000,000	60	bulan	404,415,000	DISPENDA	DISPENDA
			XX.XX.01.14	766	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	prekuensi rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	0	kali	Rp.0	50	kali	180,000,000	50	kali	174,000,000	100	kali	400,000,000	100	kali	395,000,000	100	kali	420,000,000	400	kali	1,569,000,000	DISPENDA	DISPENDA
			XX.XX.01.15	767	Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Dalam Daerah	prekuensi koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah yang dilaksanakan	0	kali	Rp.0	50	kali	20,000,000	35	kali	15,000,000	200	kali	270,000,000	175	kali	175,277,500	150	kali	225,300,000	610	kali	705,577,500	DISPENDA	DISPENDA
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan	Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	XX.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	75	%	0	80	%	584,550,000	82	%	911,905,000	83	%	1,341,455,500	84	%	897,900,000	85	%	4,433,000,000	85	%	8,168,810,500			
			XX.XX.02.01	1273	Pembangunan gedung kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dibangun	0	Unit	Rp.0	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	8	Unit	3,000,000,000	8	Unit	3,000,000,000	DISPENDA	DISPENDA
			XX.XX.02.05	1277	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan	0	Unit	Rp.0	12	Unit	246,400,000	12	Unit	271,040,000	12	Unit	298,144,000	5	Unit	354,000,000	1	Unit	650,000,000	42	Unit	1,819,584,000	DISPENDA	DISPENDA
			XX.XX.02.06	1278	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	0	Unit	Rp.0	0	Unit	0	12	Unit	76,000,000	12	Unit	261,000,000	9	Unit	86,500,000	12	Unit	120,000,000	57	Unit	543,500,000	DISPENDA	DISPENDA
			XX.XX.02.08	1280	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang diadakan	0	Unit	Rp.0	0	Unit	0	1	Unit	55,700,000	1	Unit	25,000,000	1	Unit	21,000,000	10	Unit	115,000,000	13	Unit	216,700,000	DISPENDA	DISPENDA
			XX.XX.02.11	1283	Pengadaan meubeler	Jumlah Meubeler yang diadakan	0	Unit	Rp.0	0	Unit	0	1	Unit	71,500,000	1	Unit	78,650,000	12	Unit	31,000,000	10	Unit	120,000,000	24	Unit	301,150,000	DISPENDA	DISPENDA
			XX.XX.02.12	1284	Pengadaan komputer	Jumlah perangkat komputer yang disediakan	0	Unit	Rp.0	12	Unit	185,650,000	12	Unit	204,215,000	12	Unit	224,636,500	5	Unit	66,900,000	8	Unit	70,000,000	49	Unit	751,401,500	DISPENDA	DISPENDA
			XX.XX.02.15	1287	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	0	Unit	Rp.0	12	Unit	50,000,000	12	Unit	55,000,000	18	Unit	75,000,000	21	Unit	82,200,000	25	Unit	103,000,000	88	Unit	365,200,000	DISPENDA	DISPENDA

			XX.XX.02.16	1288	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0	Unit	Rp.0	0	Unit	0	22	Unit	65,700,000	22	Unit	255,000,000	4	Unit	206,300,000	22	Unit	150,000,000	70	Unit	677,000,000	DISPENSA	DISPENSA
			XX.XX.02.19	1291	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	0	unit	Rp.0	12	unit	77,500,000	12	unit	85,250,000	12	unit	93,775,000	103	unit	50,000,000	110	unit	60,000,000	249	unit	366,525,000	DISPENSA	DISPENSA
			XX.XX.02.23	1378	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	0	Unit	Rp.0	12	Unit	25,000,000	12	Unit	27,500,000	12	Unit	30,250,000	0	Unit	0	1	Unit	45,000,000	37	Unit	127,750,000	DISPENSA	DISPENSA
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan	Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	XX.XX.05		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	75	%	0	80	%	0	82	%	56,000,000	83	%	76,000,000	84	%	91,700,000	85	%	187,000,000	85	%	410,700,000		
			XX.XX.05.01	1304	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas dan atributnya yang disediakan	0	Stel	Rp.0	0	Stel	0	105	Stel	56,000,000	125	Stel	76,000,000	130	Stel	91,700,000	135	Stel	187,000,000	495	Stel	410,700,000	DISPENSA	DISPENSA
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan	Persentase peningkatan jabatan fungsional tertentu	XX.XX.04		Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase peningkatan jabatan fungsional tertentu	20	%	0	25	%	238,230,000	28	%	262,053,000	31	%	288,258,300	36	%	225,000,000	40	%	357,000,000	40	%	1,370,541,300		
			XX.XX.04.02	1301	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Personil Yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	0	Orang	Rp.0	12	Orang	25,000,000	12	Orang	27,500,000	12	Orang	30,250,000	0	Orang	0	12	Orang	40,000,000	48	Orang	122,750,000	DISPENSA	DISPENSA
			XX.XX.04.03	1302	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek Teknis Fungsional	0	Orang	Rp.0	12	Orang	200,000,000	12	Orang	220,000,000	12	Orang	242,000,000	60	Orang	225,000,000	45	Orang	270,000,000	141	Orang	1,157,000,000	DISPENSA	DISPENSA
			XX.XX.04.16	1483	Pelatihan Panyusunan SKP	Jumlah Peserta Pelatihan Panyusunan SKP	0	orang	Rp.0	12	orang	13,230,000	12	orang	14,553,000	12	orang	16,008,300	0	orang	0	12	orang	47,000,000	48	orang	90,791,300	DISPENSA	DISPENSA
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Nilai SAKIP	XX.XX.03		Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	C		0	C	0	C	0	C	34,250,000	C		53,950,000	C		43,737,500	B		86,700,000	B		218,637,500		

			XX.XX.03.01	1293	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	0	Dokumen	Rp.0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	17,125,000	1	Dokumen	14,050,000	1	Dokumen	14,337,500	1	Dokumen	17,000,000	4	Dokumen	62,512,500	DISPENSA	DISPENSA
			XX.XX.03.03	1295	Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD	Jumlah dokumen Laporan Aset SKPD yang disusun	0	dokumen	Rp.0	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0	dokumen	0	1	dokumen	29,000,000	1	dokumen	29,000,000	DISPENSA	DISPENSA
			XX.XX.03.04	1296	Penyusunan Laporan Tahunan	Jumlah laporan tahunan yang disusun	0	Dokumen	Rp.0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	22,200,000	1	Dokumen	11,400,000	1	Dokumen	20,000,000	3	Dokumen	53,600,000	DISPENSA	DISPENSA
			XX.XX.03.05	1298	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semester yang disusun	0	Dokumen	Rp.0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	17,125,000	1	Dokumen	17,700,000	1	Dokumen	18,000,000	1	Dokumen	20,700,000	4	Dokumen	73,525,000	DISPENSA	DISPENSA
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	XX.XX.06		Program peningkatan tingkat kesiapan Pengembangan Sistem Perencanaan	Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	60	%	0	65	%	51,010,000	70	%	52,750,000	75	%	54,600,000	80	%	57,050,000	95	%	65,750,000	95	%	281,160,000		
			XX.XX.06.01	1306	Penyusunan Rencana Parangkat Daerah	Tersedianya dokumen rencana kerja SKPD selama 5 tahun	0	Dokumen	Rp.0	1	Dokumen	28,050,000	1	Dokumen	16,925,000	1	Dokumen	14,550,000	1	Dokumen	14,450,000	1	Dokumen	16,400,000	5	Dokumen	90,375,000	DISPENSA	DISPENSA
			XX.XX.06.02	1307	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	Jumlah dokumen Rencana Kerja Tahunan yang disusun	0	Dokumen	Rp.0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	16,925,000	1	Dokumen	14,650,000	1	Dokumen	14,550,000	1	Dokumen	16,700,000	4	Dokumen	62,825,000	DISPENSA	DISPENSA
			XX.XX.06.03	1308	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun	0	Dokumen	Rp.0	1	Dokumen	22,960,000	1	Dokumen	18,900,000	1	Dokumen	25,400,000	1	Dokumen	28,050,000	1	Dokumen	32,650,000	5	Dokumen	127,960,000	DISPENSA	DISPENSA
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Peningkatan Sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN dan berkinerja baik	Jumlah Penyelenggara Pameran Yang diikuti	XX.XX.07		Program Visualisasi Hasil Pembangunan	Jumlah Penyelenggaraan Pameran Yang diikuti	1	Kali	0	1	Kali	63,700,000	1	Kali	74,025,000	1	Kali	66,200,000	1	Kali	48,700,000	1	Kali	49,600,000	5	Kali	302,225,000		
			XX.XX.07.01	1313	Penyediaan Pameran Hasil Pembangunan	Penyelenggaraan pameran publikasi pembangunan	0	Kali	Rp.0	1	Kali	63,700,000	1	Kali	74,025,000	1	Kali	66,200,000	2	Kali	48,700,000	2	Kali	49,600,000	7	Kali	302,225,000	DISPENSA	DISPENSA
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Penataan sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis Sistem Informasi Manajemen keuangan Daerah secara elektronik	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Daerah	04.02.05		Program Optimalisasi Penerimaan Daerah	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Daerah	85	%	0	87	%	776,969,400	89	%	1,823,893,840	90	%	2,353,796,000	91	%	1,786,035,000	92	%	2,684,430,400	92	%	9,425,124,640		
			04.02.05.01	1498	Penghasilan pajak PBB dan BPHTB	Target PBB yang Tenagih	0	kali	Rp.0	200	kali	66,350,000	200	kali	101,251,400	200	kali	47,820,000	0	kali	0	200	kali	120,000,000	800	kali	335,421,400	DISPENSA	DISPENSA
			04.02.05.02	1519	Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB	terlaksananya program monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB	0	Kali	Rp.0	24	Kali	63,450,000	24	Kali	109,001,800	24	Kali	46,766,000	4	Kali	58,966,000	4	Kali	65,000,000	80	Kali	343,183,800	DISPENSA	DISPENSA

04.02.05.03	1628 Penerbitan SPPT dan DHKP PBB	Jumlah SPPT dan DHKP PBB yang diterbitkan	0	Wajib Pajak	Rp.0	12	Wajib Pajak	124,685,000	12	Wajib Pajak	236,816,000	12	Wajib Pajak	310,150,000	5000	Wajib Pajak	120,000,000	5300	Wajib Pajak	160,000,000	10336	Wajib Pajak	951,651,000	DISPENSA	DISPENSA
04.02.05.04	1629 Penyampaian DHKP dan SPPT PBB	Jumlah DHKP dan SPT PBB yang Didistribusikan	0	Wajib Pajak	Rp.0	24	Wajib Pajak	44,000,000	24	Wajib Pajak	74,240,400	24	Wajib Pajak	42,240,000	24	Wajib Pajak	78,615,000	24	Wajib Pajak	78,615,000	120	Wajib Pajak	317,710,400	DISPENSA	DISPENSA
04.02.05.05	1630 Identifikasi dan verifikasi wajib pajak dan retribusi daerah	Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi pajak dan retribusi daerah	0	Kali	Rp.0	24	Kali	71,170,000	24	Kali	162,800,000	24	Kali	179,080,000	12	Kali	93,100,000	24	Kali	103,800,000	108	Kali	609,950,000	DISPENSA	DISPENSA
04.02.05.06	1631 Penerbitan dan penyampaian Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah	Penerbitan SPKPRD/ SKPRD dan penyampaian dan pelayanan terhadap WP/WR	0	Dokumen	Rp.0	1	Dokumen	86,467,200	1	Dokumen	95,113,920	1	Dokumen	107,134,000	1	Dokumen	143,000,000	1	Dokumen	143,000,000	5	Dokumen	574,715,120	DISPENSA	DISPENSA
04.02.05.07	1632 Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah	Pelaksanaan monitoring dan rapat evaluasi penerimaan pajak dan retribusi daerah	0	Kali	Rp.0	24	Kali	47,550,000	24	Kali	52,305,000	24	Kali	63,900,000	4	Kali	38,200,000	4	Kali	45,000,000	80	Kali	246,955,000	DISPENSA	DISPENSA
04.02.05.08	1633 Penagihan pajak dan retribusi daerah	Pelaksanaan penagihan pajak dan retribusi daerah	0	Kali	Rp.0	1000	Kali	93,297,200	1000	Kali	102,626,920	1000	Kali	83,800,000	1000	Kali	125,550,000	1000	Kali	149,000,000	5000	Kali	554,274,120	DISPENSA	DISPENSA
04.02.05.09	1634 Rekonsiliasi penerimaan daerah	Laporan Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil dan Transfer Daerah	0	Dokumen	Rp.0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	88,560,000	1	Dokumen	61,900,000	1	Dokumen	49,300,000	1	Dokumen	63,900,000	4	Dokumen	263,660,000	DISPENSA	DISPENSA
04.02.05.10	1635 Penyusunan pelaporan rekapitulasi PAD	Laporan Rekapitulasi PAD Kabupaten Merangin	0	Dokumen	Rp.0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	106,900,000	1	Dokumen	70,600,000	1	Dokumen	39,740,000	1	Dokumen	39,740,000	4	Dokumen	256,980,000	DISPENSA	DISPENSA
04.02.05.11	1636 Pelayanan pendaftaran objek dan subjek pajak PBB DAN BPHTB	Peningkatan Objek PBB dan BPHTB	0	Wajib Pajak	Rp.0	0	Wajib Pajak	0	5500	Wajib Pajak	51,748,400	5700	Wajib Pajak	48,266,000	0	Wajib Pajak	0	6000	Wajib Pajak	103,000,000	17200	Wajib Pajak	203,014,400	DISPENSA	DISPENSA
04.02.05.12	1637 Verifikasi dan validasi piutang PBB P2	Tersedianya data rincian saldo piutang PBBP2	0	Dokumen	Rp.0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	184,550,000	1	Dokumen	140,750,000	1	Dokumen	91,850,000	1	Dokumen	91,850,000	4	Dokumen	509,000,000	DISPENSA	DISPENSA
04.02.05.13	1638 Pembuatan kartu dan identitas wajib pajak dan retribusi	Jumlah Kartu identitas WP/WR	0	Kartu	Rp.0	0	Kartu	0	2800	Kartu	136,000,000	3000	Kartu	66,140,000	0	Kartu	0	0	Kartu	0	5800	Kartu	202,140,000	DISPENSA	DISPENSA
04.02.05.14	1639 Pelayanan pendaftaran dan pembayaran pajak dan retribusi daerah	Jumlah Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang Dilayani	0	WP/WR	Rp.0	0	WP/WR	0	4500	WP/WR	127,780,000	4700	WP/WR	81,500,000	5000	WP/WR	108,900,000	2000	WP/WR	90,000,000	16200	WP/WR	408,180,000	DISPENSA	DISPENSA
04.02.05.16	1641 Pangelolaan data wajib pajak dan wajib retribusi daerah	Data wajib pajak dan data wajib pajak dan wajib retribusi daerah	0	Dokumen	Rp.0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	80,200,000	1	Dokumen	67,700,000	1	Dokumen	67,700,000	3	Dokumen	215,600,000	DISPENSA	DISPENSA

04.02.05.17	1642 Rapat koordinasi penerimaan bidang pajak, retribusi dan penerimaan lainnya	Target Penerimaan Bidang Pajak, Retribusi dan Penerimaan Lainnya yang Dicapai	0	kali	Rp.0	4	kali	180,000,000	0	kali	0	4	kali	43,200,000	0	kali	0	0	kali	0	8	kali	223,200,000	DISPENDA	DISPENDA
04.02.05.18	1643 Penataan Objek retribusi pasar	Frekwensi Penataan Objek Retribusi Pasar	0	Kali	Rp.0	0	Kali	0	0	Kali	0	4	Kali	33,400,000	4	Kali	38,100,000	4	Kali	49,000,000	12	Kali	120,500,000	DISPENDA	DISPENDA
04.02.05.19	1644 Pemuktahiran data ZNT NIR	Update Data Base Zona Nilai Tanah Nilai Indikasi Rata-Rata	0	Data Base	Rp.0	0	Data Base	0	0	Data Base	0	12	Data Base	62,466,000	1	Data Base	49,400,000	1	Data Base	49,400,000	14	Data Base	161,266,000	DISPENDA	DISPENDA
04.02.05.20	1645 Penyampaian SPT pajak dan retribusi daerah	Jumlah SPT Pajak dan Retribusi Daerah yang Terdistribusi	0	WP/WR	Rp.0	0	WP/WR	0	0	WP/WR	0	2800	WP/WR	107,134,000	0	WP/WR	0	3000	WP/WR	120,000,000	5800	WP/WR	227,134,000	DISPENDA	DISPENDA
04.02.05.21	1646 Penertiban wajib pajak dan wajib retribusi	Frekwensi Penertiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi	0	Kali	Rp.0	0	Kali	0	4	Kali	194,200,000	4	Kali	151,736,000	4	Kali	48,000,000	4	Kali	50,600,000	16	Kali	444,536,000	DISPENDA	DISPENDA
04.02.05.22	1647 Pengelolaan teknologi informasi PAD	Jumlah sistem informasi dan database management PAD yang dipelihara	0	Sitem Informasi	Rp.0	0	Sitem Informasi	0	0	Sitem Informasi	0	1	Sitem Informasi	142,100,000	1	Sitem Informasi	289,400,000	1	Sitem Informasi	200,000,000	3	Sitem Informasi	631,500,000	DISPENDA	DISPENDA
04.02.05.23	1648 Pembinaan wajib retribusi pasar dan kebersihan pasar	Jumlah Wajib Retribusi dan Kebersihan Pasar yang Dibina	0	Wajib Retribusi	Rp.0	0	Wajib Retribusi	0	0	Wajib Retribusi	0	0	Wajib Retribusi	0	0	Wajib Retribusi	0	1000	Wajib Retribusi	100,000,000	1000	Wajib Retribusi	100,000,000	DISPENDA	DISPENDA
04.02.05.24	1649 Pemuktahiran data objek pajak dan subjek pajak PBB	Database objek pajak dan subjek pajak PBB	0	Dokumen	Rp.0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	345,014,000	1	Dokumen	103,914,000	1	Dokumen	114,305,400	3	Dokumen	563,233,400	DISPENDA	DISPENDA
04.02.05.25	1650 Penyusunan dan penyempurnaan regulasi penerimaan pajak dan retribusi	Jumlah regulasi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang disusun	0	Perda/Perbup	Rp.0	0	Perda/Perbup	0	0	Perda/Perbup	0	24	Perda/Perbup	38,500,000	0	Perda/Perbup	0	0	Perda/Perbup	0	24	Perda/Perbup	38,500,000	DISPENDA	DISPENDA
04.02.05.26	1651 Sosialisasi dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan tentang pajak dan retribusi daerah	Frekuensi sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pajak dan retribusi daerah	0	Kali	Rp.0	0	Kali	0	0	Kali	0	0	Kali	0	4	Kali	134,700,000	4	Kali	142,000,000	12	Kali	276,700,000	DISPENDA	DISPENDA
04.02.05.27	1652 Pendataan dan penyampaian SPT Pajak dan Retribusi daerah	Jumlah SPT Pajak dan Retribusi daerah yang didata	0	WP/WR	Rp.0	0	WP/WR	0	0	WP/WR	0	0	WP/WR	0	2000	WP/WR	107,600,000	1500	WP/WR	100,000,000	3500	WP/WR	207,600,000	DISPENDA	DISPENDA
04.02.05.28	1658 uji petik objek dan subjek pajak daerah	jumlah data objek pajak yang diujikan	0	wp/wr	Rp.0	0	wp/wr	0	0	wp/wr	0	0	wp/wr	0	0	wp/wr	0	56	wp/wr	78,520,000	56	wp/wr	78,520,000	DISPENDA	DISPENDA
04.02.05.30	1669 pemeriksaan penelitian dan verifikasi pajak dan retribusi daerah	frekwensi pelaksanaan pemeriksaan, penelitian dan verifikasi pajak dan retribusi daerah	0	kali	Rp.0	0	kali	0	0	kali	0	0	kali	0	0	kali	0	4	kali	90,000,000	4	kali	90,000,000	DISPENDA	DISPENDA

	04.02.05.31	1870 pengajuan/ pemrosesan keberatan dan pengurangan pajak dan retribusi daerah	jumlah pengajuan/ pemrosesan keberatan dan pengurangan pajak dan retribusi daerah yang terselesaikan	0	wp/wr	Rp.0	0	wp/wr	0	0	wp/wr	0	0	wp/wr	0	0	wp/wr	0	1000	wp/wr	60,000,000	1000	wp/wr	60,000,000	DISPENDA	DISPENDA
	04.02.05.32	1871 penilaian PBB sektor menara telekomunikasi (BTS/Tower)	pelaksanaan penilaian PBB sektor menara telekomunikasi (BTS/Tower)	0	kali	Rp.0	0	kali	0	0	kali	0	0	kali	0	0	kali	0	10	kali	80,000,000	10	kali	80,000,000	DISPENDA	DISPENDA
	04.02.05.33	1872 pengelolaan dan penerbitan surat pemberitahuan pajak dan retribusi daerah	jumlah surat pemberitahuan pajak dan retribusi daerah yang terkelola dan diterbitkan	0	wp/wr	Rp.0	0	wp/wr	0	0	wp/wr	0	0	wp/wr	0	0	wp/wr	0	2000	wp/wr	130,000,000	2000	wp/wr	130,000,000	DISPENDA	DISPENDA